



LAPORAN KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan Dinas Pariwisata dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya selama Tahun 2025. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Laporan Kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi menyeluruh tentang kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Pariwisata selama tahun 2025 disertai harapan agar upaya kita mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan bidang

pariwisata dapat terwujud dengan baik demi kemajuan pariwisata Kepulauan Riau di masa yang akan datang.

Tanjungpinang, Februari 2026


KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
HASAN, S. Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 197711102006041010

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 ini merupakan Laporan Kinerja periode transisi Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Tahun 2025 - 2029. Laporan Kinerja ini menyajikan perbandingan antara capaian kinerja (*performance results*) dengan Rencana Kinerja (*Performance Plan*) dan informasi akuntabilitas kinerja selama Tahun 2025. Rencana Kinerja (*Performance Plan*) 2025 dan Penetapan Kinerja 2025 merupakan kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2025 yang sepenuhnya mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Sementara itu, capaian kinerja (*Performance Results*) merupakan hasil realisasi seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan selama tahun 2025 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja 2025.

Secara keseluruhan, LKJiP ini menyajikan dan mengungkapkan pencapaian kinerja dari 5 (lima) sasaran. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja tersebut sebanyak 6 (enam) indikator kinerja. Simpulan hasil penilaian sendiri (*self assement*) atas kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah bahwa secara keseluruhan, hasil capaian kinerja tahun 2025 menunjukkan bahwa Dinas Pariwisata telah mampu memenuhi sasaran strategis yang ditargetkan.

Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dan 6 (enam indikator). Selanjutnya sasaran strategis dan indikator tersebut diwujudkan dalam 5 (lima) program dengan anggaran total selama tahun 2025 sebesar **23.086.667.902,-**. Sasaran Strategis dan Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 adalah sebagai berikut;

1. **Meningkatnya pemasaran pariwisata** dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang) dan Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang) yang dilaksanakan melalui Program Pengemabangan Pemasaran Pariwisata.
2. **Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata** dengan indikator Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi) yang dilaksanakan melaui Program Pengembangan Dayatarik Destinasi Pariwisata.
3. **Terwujudnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel** dengan indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%) yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif.
4. **Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata** dengan Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Sub Sektor) yang dilaksanakan melalui Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
5. **Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata** dengan indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%) yang dilaksanakan melalui Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi.

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa hasil capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 seluruhnya dapat mencapai target yang ditetapkan.

Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET					REALISASI					%				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	2.500.000	370.500	474.240	1.474.269	1.621.695	3.103	758.154	1.530.899	1.667.081	2.027.037	0,12	204,63	322,81	113,08	124,99
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)	1.630.000	1.988.600	2.426.092	1.722.943	1.964.155	835.672	1.511.354	2.295.496	3.491.947	4.294.670	51,27	76,00	94,62	202,67	218,7
2.	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi)	Na	Na	Na	2	2	Na	3	2	2	2	Na	Na	Na	100	100
3.	Terwujudnya Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Mendorong Sektor Pariwisata	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Sub Sektor)	Na	Na	Na	7	7	Na	3	3	7	7	Na	Na	Na	100	100
4.	Terwujudnya Pengembangan	Persentase Sumber Daya	Na	3	3	2	2	Na	1,63	3,95	2,03	2,5	Na	54,33	131,67	101,5	125

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET					REALISASI					%				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Kredibel	Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)															
5.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%)	Na	Na	Na	100	100	14,28	14,28	80	100	100	Na	Na	Na	100	100

Sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2025 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2027 dan Penyusunan Rencana kerja Dinas Pariwisata ke depannya, yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun rencana strategis sesuai ketentuan sebagai pedoman untuk penyusunan program kerja pada lima tahun mendatang
2. Lebih mengoptimalkan promosi melalui media elektronik dan media sosial disamping biaya jauh lebih murah jangkauan promosi yang lebih luas.
3. Memperbanyak pengembangan objek wisata yang diharapkan juga dapat mendongkrak lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau.
4. Peningkatan kualitas destinasi wisata melalui pengembangan *tourism linkage networking* maupun diversifikasi objek wisata.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
6. Melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif.
7. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis yang capaian kinerjanya perlu ditingkatkan.
8. Melakukan telaah yang mendalam atas ketepatan kuantitas target dari indikator kinerja setiap sasaran strategis dikaitkan dengan perbaikan untuk Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau periode yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR BAGAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	3
1.3 Landasan Hukum	5
1.4 Maksud dan Tujuan	8
1.5 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama Organisasi	9
1.5.1.Aspek Strategis Organisasi	9
1.5.2. Permasalahan Utama Organisasi	10
1.6 SDM Aparatur	12
1.7 Sarana dan Prasarana	15
1.8 Sistematika LKIP	20
1.9 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP	21
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	26
2.1. Rencana Strategis	26
2.2. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS	
PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU.....	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	31
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi Sebelum Perubahan	33
3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi Sebelum Perubahan	93
BAB. IV. PENUTUP.....	77

LAMPIRAN

**Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2025**

SK IKU Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Ukuran Keberhasilan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	10
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan	13
Tabel 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pangkat/ Golongan	13
Tabel 1.4 Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Eselonering (Jabatan Struktural)	14
Tabel 1.5 Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Jenis Kelamin	15
Tabel 1.6 Kebutuhan Penambahan Pegawai pada Dinas Pariwisata	15
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan	28
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan	29
Tabel 3.1 Skala Peringkat Kinerja	32
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Sebelum Perubahan	33
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (sebelum perubahan) Tahun 2021 – 2025	35
Tabel 3.4 Pencapaian Sasaran I “Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata” Tahun 2025	38
Tabel 3.5 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara tahun 2025	39
Tabel 3.6 Tren Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2021-2025	40
Tabel 3.7. Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD	41
Tabel 3.8. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2024-2025	42
Tabel 3.9. Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kepulauan Riau	47

Tabel 3.10. Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara tahun 2025	53
Tabel 3.11. Tren Perkembangan Pergerakan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025	53
Tabel 3.12. Perbandingan Target Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD	55
Tabel 3.13. Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan di Indonesia Tahun 2021-2025	56
Tabel 3.14. Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung pergerakan wisatawan nusantara di Kepulauan Riau	60
Tabel 3.15. Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan tahun 2025	63
Tabel 3.16. Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan Tahun 2021-2025	64
Tabel 3.17. Perbandingan Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD	65
Tabel 3.18. Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata di Kepulauan Riau	67
Tabel 3.19. Pencapaian Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Tahun 2025	70
Tabel 3.20. Capaian Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Tahun 2021-2025	71
Tabel 3.21. Perbandingan Capaian Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD	72
Tabel 3.22. Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung target Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan.....	74
Tabel 3.23. Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Tahun 2025	80
Tabel 3.24. Tren Perkembangan Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Tahun 2021-2025	81

Tabel 3.25. Perbandingan Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD	81
Tabel 3.26 Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	84
Tabel 3.27. Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata Tahun 2025	88
Tabel 3.28. Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata Tahun 2021-2025	88
Tabel 3.29. Perbandingan Capaian IKU Dinas Pariwisata Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD	89
Tabel 3.30. Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata Kepulauan Riau	91
Tabel 3.31. Capaian Indikaor Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Setelah Perubahan) Tahun 2025	93
Tabel 3.32. Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Kepulauan Riau Tahun 2025	98
Tabel 3.33. Tren Perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2021-2025	98
Tabel 3.34. Perbandingan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD	100
Tabel 3.35. Perbandingan Rasio PDRB Penyediaan AkomodasiMakan dan Minum (%) Tahun 2025 dengan Target Nasional.....	100
Tabel 3.36. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	103
Tabel 3.37. Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau Tahun 2025	111
Tabel 3.38. Tren Perkembangan Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau Tahun 2021-2025	112
Tabel 3.39. Perbandingan Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD	113
Tabel 3.40. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

LKjIP merupakan wujud kinerja yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun mendatang.

Pelaporan kinerja ini juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025, yang merupakan penjabaran dari visi, misi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan tujuan yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 serta Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 perlu dilakukan penilaian dan evaluasi. Pengukuran pencapaian kinerja tersebut untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, substansi penyusunan LKjIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis, program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu

melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Provinsi dan Nasional. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, merupakan bagian dari tahapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam upaya mendorong terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dengan dilakukannya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi terkait kinerja yang terukur kepada pemberi amanat atas kinerja yang sudah dicapai dan yang seharusnya dicapai oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau.
2. Mendorong Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara dengan baik dan benar sesuai dengan landasannya, yaitu peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang transparan sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau agar dapat meningkatkan kinerjanya.

4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat. telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran.

1.2. Gambaran Umum Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41). Berdasarkan uraian tugas dan fungsi pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi:

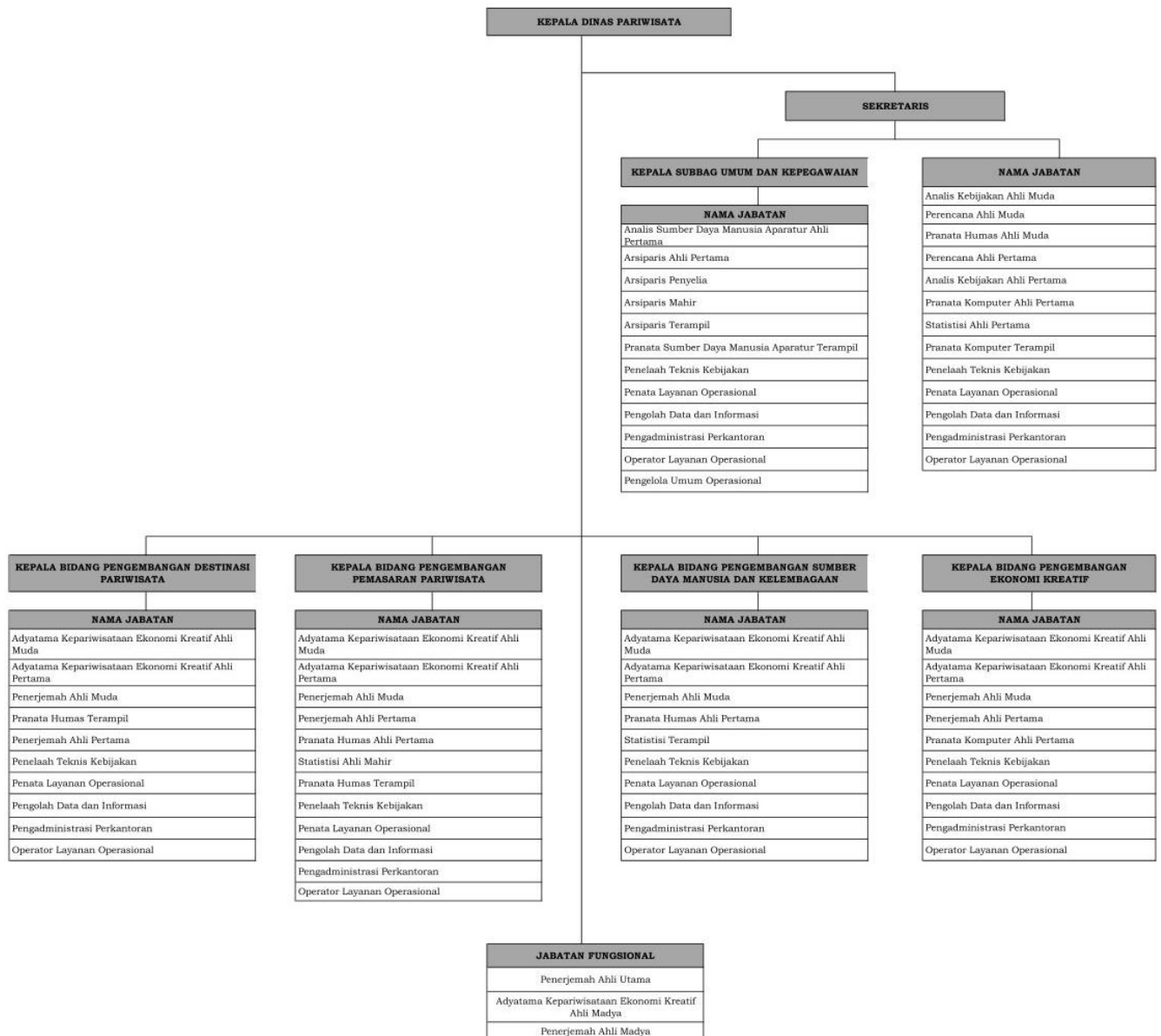
- a) perumusan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- b) pelaksanaan kebijakan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- d) pelaksanaan administrasi dinas di bidang Sekretariat, Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- e) penerapan sistem pengendalian intern pada perangkat daerah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- f) pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya;
- g) penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; dan
- h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Pariwisata terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata;
- d. Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
- e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
- f. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan sebagai berikut:



Bagan 1. Struktur Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

1.3. Landasan Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- f. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

- h. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 63);
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
- k. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 5);
- l. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 348);
- m. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 903);

- n. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 48 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1068).

1.4. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah untuk mengukur, mengevaluasi kinerja serta melakukan analisis dan interpretasi terhadap pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata selama tahun anggaran 2025.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata tahun 2025 disusun dengan maksud untuk melihat tingkat pencapaian kinerja baik kinerja program dan kegiatan yang telah dilaksanakan maupun akuntabilitas/pertanggung jawaban keuangan pada tahun dimaksud.

Laporan Kinerja Dinas Pariwisata tahun 2025 disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Mengukur, mengevaluasi dan menganalisis kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025;
3. Meningkatkan Akuntabilitas Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sebagai penanggungjawab urusan Pariwisata;
4. Sebagai bahan acuan perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

1.5. Isu Strategis dan Permasalahan Utama

1.5.1. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Dinas Pariwisata memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Daerah Kepulauan Riau. Peran strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Visi Pembangunan Kepala Daerah terpilih yaitu **"Kepulauan Riau Maju, Makmur, dan Merata"** serta visi gubernur dan wakil gubernur terpilih yang merumuskan misi ke dalam 5 (lima) agenda prioritas Pemerintah Daerah Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam RPJMD. Di dalamnya, terkandung agenda prioritas Pemerintah Daerah Kepulauan Riau yang terkait dengan pariwisata pada misi pertama yaitu **Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah**. Misi ini menggambarkan potensi sumber daya alam di seluruh wilayah kepulauan Riau yang dikelola secara baik dan memberi manfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat, diantaranya melalui peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, peningkatan daya saing produk sumber daya alam, dukungan terhadap industri kecil dan menengah, meningkatkan ketahanan pangan dan semakin fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran serta meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif. Sektor pariwisata akan meningkatkan daya saing Kepulauan Riau, dengan memanfaatkan potensi yang selama ini belum dikelola optimal, salah satunya adalah potensi maritim, semata-mata untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.

Berdasarkan pijakan visi misi di atas, tujuan pembangunan kepariwisataan daerah Kepulauan Riau 2025-2029 adalah **"Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif"**.

Adapun ukuran keberhasilan dan target yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau sesuai bidang urusan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 : Ukuran Keberhasilan Kinerja
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau**

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET (2029)
1.	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.9	2.41
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	15.932,37	25.667,50

1.5.2 Permasalahan Utama Organisasi

Permasalahan pembangunan sektor pariwisata meliputi permasalahan pada Pengembangan Destinasi Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pengembangan Industri Pariwisata, Pengembangan Sumberdaya dan Kelembagaan Pariwisata, serta Pengembangan Ekonomi Kreatif. Secara umum, permasalahan pada urusan pariwisata tercermin dalam belum optimalnya kunjungan wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Hal ini diikuti dengan penurunan rata-rata lama tinggal wisatawan dan rata-rata tingkat hunian hotel di Kepulauan Riau, pengeluaran wisatawan, dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.

Berdasarkan hasil telaahan dan analisis dari permasalahan pembangunan dan isu/kebijakan nasional dan regional, maka isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau terkait pembangunan Pariwisata di Kepulauan

Riau yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan dapat digambarkan masing-masing program sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola kepariwisataan, belum adanya *grand design* pembangunan kepariwisataan, belum optimalnya destinasi obyek wisata di Provinsi Kepulauan Riau Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung pariwisata, kesiapan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata yang masih belum optimal, dan sinergi antar mata rantai usaha pariwisata yang masih belum optimal. Program yang dapat menjawab permasalahan-permasalahan tersebut adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
2. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata minimnya penyelenggaraan even pariwisata daerah, diperlukan insentif bagi pelaku industri pariwisata, diperlukan peningkatan promosi pariwisata serta *tourism linkage networking* antar lembaga dan antar kabupaten dan kota, strategi komunikasi pemasaran wisata yang belum terpadu, sinergi kemitraan pemasaran wisata masih belum optimal, dan kegiatan promosi wisata masih belum maksimal. Permasalahan dan isu isu terkait pemasaran pariwisata merupakan fokus perhatian dan memerlukan upaya peningkatan yang akan dilaksanakan melalui Program Pemasaran Pariwisata.
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata dan Ekonomi kreatif sumber daya manusia pariwisata baik dari industri pariwisata maupun SDM Aparatur Pemerintah Daerah serta koordinasi dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan regional yang belum efektif. Penyelesaian permasalahan pada sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif ini dilakukan Upaya Peningkatan dan usaha melalui pelaksanaan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Belum optimalnya penyelenggaraan ekonomi kreatif merupakan isu strategis yang menjadi fokus perhatian dan upaya peningkatan ke depan di antaranya masih diperlukan pengembangan, pendampingan, dan pemasaran pelaku

ekonomi kreatif, diperlukan pemberdayaan ekonomi kreatif di daerah wisata, diperlukan perlindungan hukum terhadap industri kreatif, sarana prasarana ekonomi kreatif belum optimal, kurangnya perluasan dan penetrasi pasar bagi produk dan jasa kreatif, belum adanya standardisasi terhadap ekonomi kreatif, dan pengembangan sumber daya ekonomi kreatif belum optimal. Permasalahan dan isu tersebut akan diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

1.6. SDM Aparatur

Sumber daya merupakan suatu ketersediaan yang dimiliki dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Dukungan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Saat ini kondisi Kepegawaian di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 72 (tujuh puluh dua) orang yang terdiri dari Pejabat eselon II berjumlah 1 orang, pejabat eselon III berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari Sekretaris Dinas Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan, Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, 19 (sembilan belas) fungsional, 1 (satu) Kasubbag dan 16 (enam belas) pelaksana, serta 25 (dua puluh lima) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 5 (lima) orang staf Tenaga Harian Lepas.

Berdasarkan kualifikasi pendidikan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan bulan Januari 2026 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.2. Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Pendidikan Terakhir	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	Strata 2 (S2)	6	6	12 orang
2.	Strata 1 (S1)	19	16	35 orang
3.	Ahli Madya (D3)	1	3	4 orang
4.	SLTA dan Sederajat	10	5	15 orang
5.	SLTP	-	-	0 orang
6.	SD	1	-	1 orang
Jumlah		37	30	67 Orang

Dari sisi jenis pendidikan, latar belakang pendidikan didominasi oleh Strata 1, sedangkan dari sisi golongan, didominasi oleh Golongan III. Sedangkan berdasarkan pangkat dan golongan pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sampai bulan Januari 2026 dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.3. Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Pangkat/ Golongan dan Jenis Kelamin

No.	Pangkat/ Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1 orang
2.	Pembina TK. I (IV/B)	2	2	4 orang
3.	Pembina (IV/A)	3	4	7 orang
4.	Penata TK. I (III/D)	7	2	9 orang
5.	Penata (III/C)	1	4	5 orang

6.	Penata Muda TK. I (III/B)	4	6	10 orang
7.	Penata Muda (III/A)	1	2	3 orang
8.	Pengatur TK. I (II/D)	1	1	2 orang
9.	Pengatur (II/C)	0	1	1 orang
10.	Pengatur Muda (II/B)	0	0	0 orang
11.	PPPK Golongan IX	7	4	11 orang
12.	PPPK Golongan V	9	4	13 orang
13.	PPPK Golongan I	1	0	1 orang
Jumlah		37	30	67 Orang

Selain itu masih terdapat 5 (lima) orang pegawai Tenaga Harian Lepas yang saat ini masih mengikuti seleksi PPPK tahap II. Sedangkan keadaan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan eselonering (jabatan struktural) hingga bulan Januari 2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.4. Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Berdasarkan Eselonering (Jabatan Struktural)

No.	Tingkat Eselonering	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Eselon II	1	-	1 orang
2.	Pejabat Eselon III	3	2	5 orang
3.	Pejabat Eselon IV	-	1	1 orang
4.	Fungsional	10	9	19 orang
5.	Pelaksana PNS	6	10	16 orang
6.	Pelaksana PPPK	17	8	25 orang
6.	Staf THL	3	2	5 orang
Jumlah		40	32	72 Orang

Sementara keadaan Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan klasifikasi jenis kelamin pada Januari 2026 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 1.5. Kondisi Pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai
1.	Laki-laki	40 orang
2.	Perempuan	32 orang
Jumlah		72 orang

Berdasarkan sumber daya pegawai yang ada, apabila dibandingkan dengan kebutuhan ideal jumlah pegawai berdasarkan struktur perangkat daerah Dinas Pariwisata, maka Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sedikitnya masih memerlukan 15 (lima belas) orang jumlah pegawai dengan rincian 3 (tiga) orang staf yang akan dibagi pada masing-masing bidang. Rincian kebutuhan penambahan pegawai dapat dilihat sebagaimana pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.6. Kebutuhan Penambahan Pegawai pada Dinas Pariwisata

No	Kebutuhan Pegawai	Jumlah
1.	Staf PNS	15 orang
Jumlah		15 Orang

1.7. Sarana dan Prasarana

Sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selain dari SDM adalah ketersediaan aset-aset yang terkait dengan sarana dan prasarana pendukung pembangunan dan pengembangan pariwisata. Dari sisi Bidang

Pariwisata, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan destinasi pariwisata dan komponen pendukungnya sebagai prasyarat utama dalam menarik kunjungan wisatawan ke Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Ditinjau dari asset sarana prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan bulan Januari 2026 berjumlah total 566 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 1.7. Rekap Aset Dinas Pariwisata Tahun 2026

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
1	Tanah	M2	1	1	-	-
2	Mobil Dinas	Unit	5	2	1	2
3	Sepeda Motor	Unit	3	3	-	-
4	Mesin Ketik Listrik Portable	Unit	3	3	-	-
5	Lemari Besi/Metal	Unit	15	15	-	-
6	Lemari Kayu	Unit	27	27	-	-
7	Rak Besi	Unit	45	45	-	-
8	Rak Kayu	Unit	3	3	-	-
9	Filing Cabinet Besi	Unit	6	6	-	-
10	Filing Cabinet Kayu	Unit	1	1	-	-
11	Brangkas	Unit	1	-	-	1
12	Lemari Display	Unit	1	1	-	-
13	Lemari Kaca	Unit	40	40	-	-
14	Locker Katun	Unit	1	1	-	-
15	Alat Penghancur Kertas	Unit	5	5	-	-
16	Mesin Absensi	Unit	2	2	-	-
17	Alat Pemotong Kertas	Unit	6	2	-	4
18	Display	Unit	2	2	-	-
19	Papan Nama Instansi	Unit	3	-	-	3

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
20	Brand Kas	Unit	3	3	-	-
21	Meja Kerja Kayu	Unit	14	10	-	4
22	Kursi Besi/Metal	Unit	2	2	-	-
23	Meja Rapat	Unit	9	9	-	-
24	Meja Resepsionis	Unit	2	1	-	1
25	Kursi Rapat	Unit	2	2	-	-
26	Kursi Tamu	Unit	2	2	-	-
27	Partisi Kaca	Set	1	1	-	-
28	Partisi HPL	Set	1	1	-	-
29	Sofa	Unit	8	8	-	-
30	Filling Besi/Metal	Unit	2	-	-	2
31	Mesin Potong Rumput	Unit	1	-	-	1
32	Lemari Es	Unit	1	1	-	-
33	AC Unit	Unit	3	3	-	-
34	Rak Piring Alumunium	Unit	2	2	-	-
35	Televisi	Unit	19	19	-	-
36	Loudspeaker	Unit	1	1	-	-
37	Microphone	Set	1	1	-	-
38	Unit Power Supply	Unit	2	-	-	2
39	Camera Video	Unit	7	-	3	4
40	Dispenser	Unit	1	1	-	-
41	Gordyin/Kray	Set	1	1	-	-
42	Figura	Unit	20	20	-	-
43	Handtruck Trolly Plastics	Unit	1	1	-	-
44	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	1	1	-	-
45	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	3	3	-	-
46	Meja Tamu Ruangan Biasa	Unit	2	2	-	-
47	Meja Rapat Pejabat Lain-Lain	Unit	1	1	-	-
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	2	-	-
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	3	3	-	-

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
50	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Unit	20	20	-	-
51	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	Unit	2	2	-	-
52	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	6	6	-	-
53	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	Unit	7	-	-	7
54	Modulation Monitor Speaker Kabaret	Set	3	3	-	-
55	Sound Card STEINBERG - UR 824	Unit	1	1	-	-
56	Monitor Speaker	Unit	1	1	-	-
57	Power Mixer	Unit	1	1	-	-
58	Kabel Microphone	Set	1	1	-	-
59	Keyboard Midi	Unit	1	1	-	-
60	Camera + Attachment	Unit	2	-	-	2
61	Proyektor + Attachment	Unit	3	3	-	-
62	Printer	Unit	6	6	-	-
63	Kamera Udara (Drone)	Unit	1	1	-	-
64	Handy Talky	Unit	22	12	-	10
65	Facsimile	Unit	2	-	-	2
66	Video Conferencing Sytem	Set	1	1	-	-
67	Personal Komputer	Unit	9	9	-	-
68	Jaringan Website	Set	1	-	-	1
69	PC. Unit	Unit	44	14	-	30
70	Lap Top	Unit	42	20	-	22
71	Note Book	Unit	3	2	-	1
72	Printer	Unit	48	15	5	28
73	Scanner	Unit	2	2	-	-
74	Server	Unit	2	-	-	2
75	Closed Circuit Television (CCTV)	Set	1	-	-	1
76	Air Conditioning (AC)	Unit	15	15	-	-
77	Rambu Jalan	Set	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
78	Peralatan Olah raga air	Set	2	2	-	-
79	Rumah Genset Gedung LAM	Unit	1	1	-	-
80	Pos Jaga, Ruang CCTV dan Toilet Pulau Penyengat	Paket	1	1	-	-
81	Penataan Pelabuhan Penyengat	Paket	1	1	-	-
82	Counter Pusat Informasi (TIC)	Paket	1	-	-	1
83	Rehap Bangunan Air Panas Kab. Karimun	Paket	2	2	-	
84	Rehab Replika Istana Damnah Kab. Lingga	Paket	1	1	-	
85	Landscaping Kota Rebah Tanjungpinang	Paket	1	1	-	
86	Taman Istana Engku Bilik (Penyengat)	Paket	1	1	-	
87	Renovasi Bukit Kursi Pulau Penyengat	Paket	1	1	-	
88	Renovasi Barak Pengungsi Pulau Galang	Paket	1	1	-	
89	Renovasi Rumah Penjara Lingga	Paket	1	1	-	
90	Renovasi Bangunan Pulau Penyengat (Engku Bilik)	Paket	1	1	-	
91	Manara Pandang + Pos Peristirahatan	Set	1		-	1
92	Bangunan Obyek Wisata Air Terjun Anambas	Paket	1	1	-	-
93	Manara Pandang + Pos Peristirahatan	Unit	1	1	-	-
94	Gazebo (Bintan)	Unit	3	3	-	-
95	Batu Sikat Lantai Pelabuhan Pulau	Paket	1	1	-	-

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH	KONDISI BARANG		
				BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT
	Penyengat					
96	Rehap Monumen Tugu Khatulistiwa Lingga	Paket	1	1	-	-
97	Jalan Lingkar Pulau Penyengat	Paket	2	2	-	-
98	Rehap Dermaga Pulau Penyengat	Paket	1	1	-	-
99	Rehap Dermaga Pulau Abang	Paket	1	1	-	-
100	Sumur Bor + Menara Air + Instalasi Gedung LAM Dompok	Paket	1	1	-	-
101	Dock Start Elang Laut Belakang Padang	Unit	1	1	-	-
102	Film Bergerak & Rekaman (Film Raja Ali Haji)	Unit	1	1	-	-
TOTAL			566	425	9	132

1.8. Sistematika LKIP

Sesuai dengan Format Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulisan Laporan Kinerja ini disusun dengan sistematika sebagai berikut; penulisan Laporan Kinerja ini terbagi dalam IV (empat) bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Perjanjian Kinerja, Bab III Akuntabilitas Kinerja, dan Bab IV Penutup. Selain itu penulisan Laporan Kinerja ini juga dilengkapi dengan kelengkapan isi yaitu : kata pengantar, daftar isi, ikhtisar eksekutif, dan daftar lampiran. Untuk lebih

memudahkan dalam memahami isi Laporan Kinerja ini, maka uraian bab demi bab komposisinya disajikan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang yang mendasari diadakannya pelaporan, gambaran umum organisasi yang menggambarkan secara umum tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, aspek strategis serta permasalahan utama organisasi, SDM Aparatur, Sarana dan prasarana. Pada akhir bab ini akan menguraikan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip.

Bab II Perjanjian Kinerja

Bab ini akan menguraikan rencana strategis dan ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2025.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini akan membahas tentang capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selama tahun 2025 untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Bab IV Penutup

Pada bab ini akan disampaikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

1.9. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kinerja Organisasi oleh Inspektorat Daerah Povinsi Kepulauan Riau Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau **Nomor : LHE.028/EVALUASI-SAKIP/ITPROV.2/2025 tanggal 11 Juli 2025** disampaikan beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan tindaklanjut yang dilakukan, diantaranya;

1. Perencanaan Kinerja

Rekomendasi

Melakukan perbaikan dokumen rencana aksi dengan format tabel sesuai Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan dengan aktivitas (langkah aksi) yang diperlukan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

Tindaklanjut

Atas rekomendasi tersebut Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjutinya dan melakukan perbaikan rencana aksi setelah menerima Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Kinerja Organisasi pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, dilanjutkan penyusunan rencana aksi pada perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025 dan rencana aksi atas kinerja tahun 2026 telah disusun dengan format tabel sesuai Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Pengukuran Kinerja

Rekomendasi

- a. Melakukan revisi terhadap dokumen IKU untuk menambahkan definisi operasional yang jelas atas kinerja
- b. Memantau aktivitas (langkah aksi) pada dokumen rencana aksi sehingga data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan
- c. Memantau aktivitas (langkah aksi) pada dokumen rencana aksi sehingga kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan

- d. Mendokumentasikan tentang pemanfaatan hasil pengukuran kinerja saat promosi, mutasi, dan penghapusan jabatan
- e. Melakukan analisa dan pembahasan terkait penyesuaian organisasi telah berdasarkan pengukuran kinerja
- f. Melakukan pembahasan terkait pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas (langkah aksi) dalam mencapai kinerja
- g. Melakukan pembahasan terkait pengukuran kinerja dijadikan dasar dalam penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja

Tindaklanjut

Terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjutinya sebagai berikut;

- a. Telah melakukan revisi terhadap dokumen IKU dengan menambahkan definisi operasional yang jelas atas kinerja
- b. Telah melakukan pemantauan aktivitas (langkah aksi) pada dokumen rencana aksi secara berkala (triwulanan)
- c. Melakukan pemantauan aktivitas (langkah aksi) pada dokumen rencana aksi sehingga kinerja yang dikumpulkan mendukung capaian kinerja yang diharapkan
- d. Belum mendokumentasikan tentang pemanfaatan hasil pengukuran kinerja karena belum ada promosi, mutasi, dan penghapusan jabatan
- e. Telah melakukan pembahasan terkait pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas (langkah aksi) dalam mencapai kinerja.

3. Pelaporan Kinerja

Rekomendasi

- a. Menyampaikan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah ke Biro Organisasi tepat waktu, selambat-lambatnya minggu ke-4 bulan Januari tahun berikutnya

- b. Agar melakukan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja berkala
- c. Agar melakukan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja berkala
- d. Agar melakukan survei internal untuk mengetahui sejauh mana laporan kinerja telah mempengaruhi budaya kinerja organisasi

Tindaklanjut

Terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjutinya sebagai berikut;

- a. Belum menyampaikan Dokumen Kinerja Perangkat Daerah ke Biro Organisasi tepat waktu (minggu ke-4 bulan Januari tahun berikutnya) karena baru mendapatkan data capaian kinerja final pada bulan Februari tahun berikutnya.
- b. Telah melakukan penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja berkala
- c. telah melakukan penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja berdasarkan informasi dalam laporan kinerja berkala
- d. belum melakukan survei internal untuk mengetahui sejauh mana laporan kinerja telah mempengaruhi budaya kinerja organisasi

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Rekomendasi

- a. Menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi AKIP dan matriks penyelesaian Tindak Lanjut Evaluasi AKIP dengan format tabel sesuai Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah

- c. Meningkatkan pemanfaatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada setiap komponen yang menjadi penilaian serta mendokumentasikannya
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta mendokumentasikannya

Tindaklanjut

Terhadap rekomendasi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah menindaklanjutinya sebagai berikut;

- a. Telah menyusun Rencana Aksi Tindak Lanjut Evaluasi AKIP dan matriks penyelesaian Tindak Lanjut Evaluasi AKIP dengan format tabel sesuai Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b. Telah membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah
- c. Berusaha meningkatkan pemanfaatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja pada setiap komponen yang menjadi penilaian serta mendokumentasikannya
- d. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta mendokumentasikannya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau merupakan manifestasi komitmen Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Kepulauan Riau yang tertuang dalam RPJMD Kepulauan Riau. Tahun 2025 merupakan tahun transisi periode perencanaan, di mana pada tahun tersebut berlaku 2 (dua) dokumen perencanaan.

RPJMD Pemerintah Daerah Kepulauan Riau merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan yang disahkan melalui Peraturan Daerah. Pada tahun perencanaan 2025 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 di mana pada pelaksanaannya telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, di mana dalam perubahan RPJMD tersebut juga turut merubah rencana strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026. Selanjutnya seiring dengan Penetapan RPJPN dan RPJPD Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029. Kedua dokumen tersebut menjadi acuan dalam Pembangunan kepariwisataan di Kepulauan Riau tahun 2025.

2.2. Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau secara terencana dan berkesinambungan melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, termasuk di dalamnya adalah Perencanaan Kinerja 2025 yang merupakan proses perencanaan kinerja yang didokumentasikan dalam Rencana Kinerja Tahunan (*Annual Performance Plan*). Penyusunan rencana kinerja ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran. Setelah anggaran ditetapkan, maka disusunlah Penetapan Kinerja yang merupakan komitmen Dinas Pariwisata untuk dicapai dalam tahun tersebut.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau memiliki 2 (dua) dokumen perencanaan yang berlaku pada tahun 2025, yaitu berdasarkan RPJMD 2021 – 2026 dan RPJMD 2025 – 2029 di mana di dalamnya terdapat beberapa nomenkelatur sasaran, indikator kinerja, maupun target yang mengalami perubahan. Sasaran strategis, indikator kinerja, dan target kinerja yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 baik sebelum maupun sesudah perubahan disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Sebelum Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	1.621.695
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)	1.964.155
2.	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi)	2
3.	Terwujudnya Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Mendorong Sektor Pariwisata	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Sub Sektor)	7
4.	Terwujudnya Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Kredibel	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)	2
5.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%)	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 8.708.633.839,-	APBD
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 180.266.734,-	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 359.750.700,-	APBD
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan	Rp. 810.333.811,-	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
Intelektual		
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.825.294.503,-	APBD

Sedangkan Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 disajikan sebagaimana table berikut;

Tabel: 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Setelah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,0
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (Milyar Rupiah)	17.620,25

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 7.758.633.839,-	APBD
2. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 220.725.000,-	APBD
3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 1.307.813.811,-	APBD
4. Program Pengembangan Sumber	Rp. 359.750.700,-	APBD

Program	Anggaran	Keterangan
Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.442.092.865,-	APBD

Format Perjanjian Kinerja kinerja telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. (Perjanjian Kinerja tahun 2025 terlampir).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau selaku pengemban amanah dari Gubernur Kepulauan Riau melaksanakan kewajiban akuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Pengukuran dimaksud merupakan hasil dan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan (*input*) dan keluaran (*output*). Penilaian tersebut tidak

terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan program/ kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran ini menggunakan pedoman penilaian skala peringkat kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja sebagaimana pada tabel 3.1. sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Skala Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Status
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi (ST)
2.	$76 \leq 90$	Tinggi (T)
3.	$66 \leq 75$	Sedang (S)
4.	$51 \leq 65$	Rendah (R)
5.	≤ 50	Sangat Rendah (SR)

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.1. Capaian Kinerja Organisasi Indikator Sebelum Perubahan

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat sebagaimana tabel 3.2. berikut:

Tabel 3.2.
Capaian Indikaor Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Sebelum Perubahan
Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	STATUS
1.	Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	1.621.695	2.027.037	124,99	ST
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	Orang	1.964.155	4.294.670	218,7	ST
2.	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan	Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi	2	2	100	ST
3.	Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Sub Sektor	7	7	100	ST
4.	Terwujudnya	Persentase	%	2	2,5	125	ST

	pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel	Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)					
5.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata	%	100	100	100	ST

Sumber data BPS dan Dinas Pariwisata

Ditinjau dari masing-masing sasaran pada tahun 2025, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi dengan baik. Dari kelima sasaran strategis dan 6 (enam) indikator yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat dicapai dengan baik seluruhnya. Mempedomani skala peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dengan status kinerja Sangat Tinggi yaitu : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (124,99%), Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (218,7%), Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan (100%), Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (125%), Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (100%), dan Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (100%).

Berikut disampaikan tabel capaian kinerja Dinas Pariwisata dalam 5 (lima) tahun terakhir sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada di Dinas Pariwisata sebagaimana disajikan pada tabel 3.3. di bawah ini:

Tabel 3.3.
Perbandingan Indikator Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Sebelum Perubahan)
Tahun 2021-2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET					REALISASI					%				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	2.500.000	370.500	474.240	1.474.269	1.621.695	3.103	758.154	1.530.899	1.667.081	2.027.037	0,12	204,63	322,81	113,08	124,99
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)	1.630.000	1.988.600	2.426.092	1.722.943	1.964.155	835.672	1.511.354	2.295.496	3.491.947	4.294.670	51,27	76,00	94,62	202,67	218,7
2.	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi)	Na	Na	Na	2	2	Na	3	2	2	2	Na	Na	Na	100	100
3.	Terwujudnya Usaha Ekonomi	Jumlah Sub Sektor	Na	Na	Na	7	7	Na	3	3	7	7	Na	Na	Na	100	100



Laporan Kinerja
Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA CAPAIAN	TARGET					REALISASI					%				
			2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
	Kreatif Dalam Mendorong Sektor Pariwisata	Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Sub Sektor)															
4.	Terwujudnya Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Kredibel	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)	Na	3	3	2	2	Na	1,63	3,95	2,03	2,5	Na	54,33	131,67	101,5	125
5.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%)	Na	Na	Na	100		14,28	14,28	80	100	100	Na	Na	Na	100	100

Sumber data BPS dan Dinas Pariwisata

Dari tabel pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 di atas dapat dijelaskan bahwa dari 5 (lima) Sasaran Strategis dan 6 (enam) Indikator Kinerja beserta target yang telah ditetapkan dapat dicapai seluruhnya.

Berikut akan diuraikan kinerja dari Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 dilihat dari masing-masing tujuan, sasaran strategis, indikator, dan target yang telah ditetapkan.

Sasaran I

Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Pengembangan Pemasaran Pariwisata tidak lepas dari kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tidak bisa mewujudkan sasaran ini sendiri. Pariwisata Kepulauan Riau menjadi tanggung jawab semua elemen, baik pemerintah daerah, akademisi, industri, komunitas, dan juga media. Berkembangnya sektor pariwisata sangat bergantung dari sektor lainnya, pada prinsipnya pembangunan pariwisata dikerjakan lintas sektor dan lintas aktor. Selama ini Dinas Pariwisata telah bekerjasama dengan *stakeholder* terkait dalam upaya pengembangan pariwisata sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sektor pariwisata di Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Riau dan Kepulauan Riau sendiri juga telah ditetapkan menjadi salah satu destinasi pariwisata nasional. Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor unggulan dan fokus pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang harus ditingkatkan daya saingnya.

Meningkatnya pengembangan pemasaran pariwisata ditandai dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun perjalanan wisatawan nusantara, serta meningkatnya total pengeluaran wisatawan di

Kepulauan Riau. Pencapaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada tahun 2025 dilaksanakan dengan Program Pemasaran Pariwisata.

Indikator keberhasilan sasaran strategis berikut target dan realisasinya pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.4. berikut :

Tabel 3.4.
Pencapaian Sasaran I "Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata" Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	1.621.695	2.027.037	124,99
2.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)	1.964.155	4.294.670	218,7

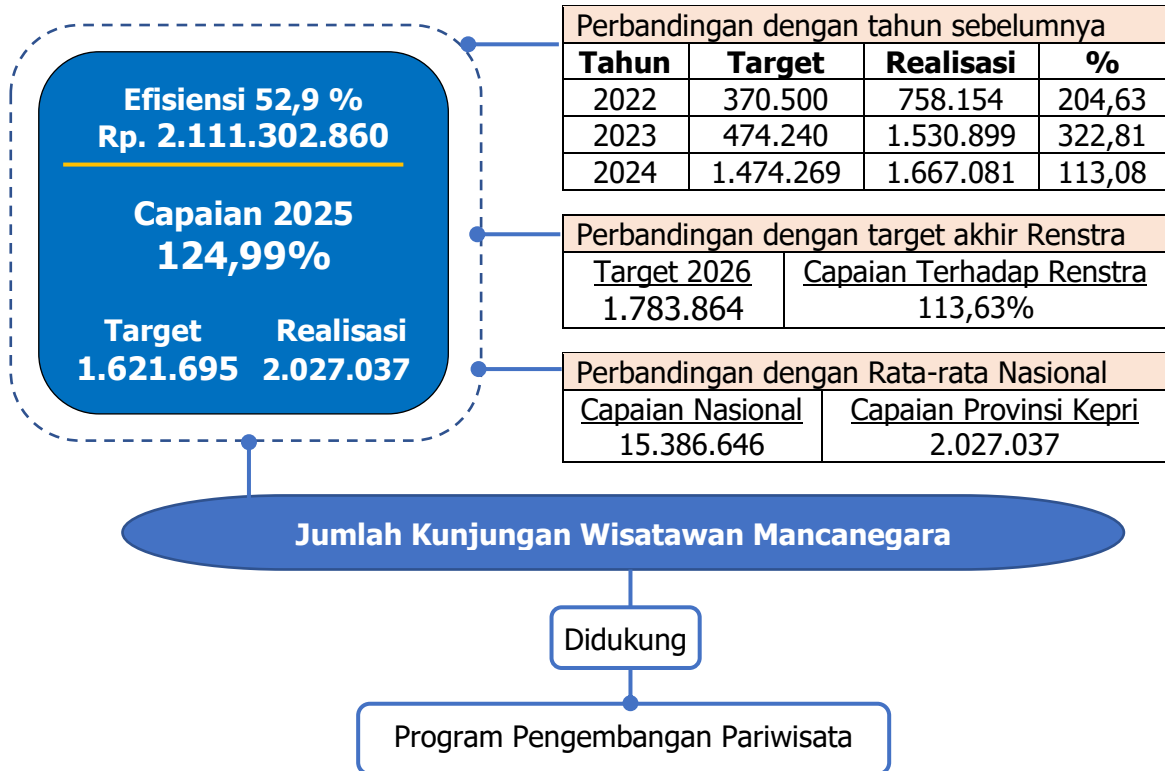
Dalam sasaran Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata terdapat 2 (dua) indikator yang akan diuraikan satu persatu sebagai berikut:

**SASARAN I:
MENINGKATNYA
PENGEMBANGAN
PEMASARAN
PARIWISATA**

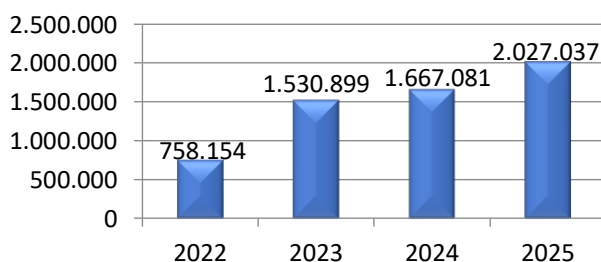
**Indikator I:
Jumlah Kunjungan
Wisatawan
Mancanegara**

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah setiap orang yang berasal dari luar wilayah Indonesia, yang mengunjungi Indonesia, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi, dengan lama tinggal minimal 24 jam dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dengan tujuan: berlibur, rekreasi, olah raga, bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan.

Capaian Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 2.027.037 orang dari target sebesar 1.621.695 orang sehingga capaian kinerja mencapai 124,99%.



Tren Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara



Formulasi Indikator Kinerja

"Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara diperoleh dari hasil perhitungan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau"

Sasaran I Indikator 1

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara

Wisatawan Mancanegara pada indikator ini adalah setiap orang yang berasal dari luar wilayah Indonesia, yang mengunjungi Indonesia, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi, dengan lama tinggal minimal 24 jam dan tidak lebih dari 1 (satu) tahun, dengan tujuan: berlibur, rekreasi, olah raga, bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar, dan keagamaan. Kedatangan wisatawan akan sangat membantu suatu daerah dalam meningkatkan perekonomian, karena wisatawan dapat menimbulkan *multiplier effect* bagi daerah yang dikunjunginya. Dampak kunjungan wisatawan akan dirasakan langsung oleh pengelola akomodasi, sektor konsumsi/makan minum, transportasi, hiburan, dan penyedia oleh-oleh tentunya. Oleh karena itu pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau sangat gencar berusaha meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan yang dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.

Indikator jumlah kunjungan wisatawan mancanegara menunjukkan total jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau yang dihitung berdasarkan data melalui 4 (empat) pintu masuk yaitu; Kota Batam, Kota Tanjungpinang, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Bintan.

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau tahun 2025 dapat digambarkan jumlah seluruh wisatawan

mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau dengan jumlah total 2.027.037 kunjungan wisatawan mancanegara. Hasil evaluasi jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dengan target 1.621.695 kunjungan wisatawan mancanegara dapat tercapai 2.027.037 kunjungan wisatawan mancanegara sehingga capaian kinerja sebesar 124,99 % atau dalam kategori kinerja Sangat Tinggi (ST).

Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut:

Tabel. 3.5.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	1.621.695	2.027.037	124,99

Sumber data BPS

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan capaian beberapa tahun terakhir

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau mengalami trend yang sangat positif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3. 6.
Tren Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara
Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	2.500.000	370.500	474.240	1.474.269	1.621.695	3.103	758.154	1.530.899	1.667.081	2.027.037

	(orang)										
--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data BPS

Dapat dilihat dari tabel di atas jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2025 sebesar 2.027.037 kunjungan, mengalami kenaikan sebesar 21,59% di mana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2024 sebesar 1.667.081 kunjungan.

jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 2.027.037 kunjungan, mengalami kenaikan sebesar 32,4% di mana kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2023 sebesar 1.530.899 kunjungan.

Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk ke Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 sebesar 2.027.037 kunjungan, mengalami kenaikan sebesar 167,2% jika dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2022 di mana kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 758.154 kunjungan.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Kinerja target tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025 yang juga sekaligus menjadi periode ke lima RPJMD tahun 2021-2026, maka Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melampaui target pada akhir periode RPJMD/Renstra (2026), di mana pada akhir periode RPJMD jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ditargetkan sebesar 1.783.864 kunjungan yang berarti mencapai angka 113,63%. Perbandingan target akhir RPJMD dengan capaian tahun 2025 disajikan seperti pada table 3.7. di bawah:

Tabel 3.7.
Perbandingan Capaian Kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target akhir Renstra/RPJMD (2026)	%
1.	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	2.027.037	1.783.864	113,63

D. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada)

Posisi Jumlah Kunjungan Wisatawan mancanegara yang datang ke Kepulauan Riau ditingkat nasional dapat digambarkan sebagaimana tabel berikut:

Tabel: 3.8.
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia Menurut Provinsi Tahun 2024-2025

No	Pintu Masuk/ Provinsi	2024		2025	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Bali	6.326.749	45,51	6.935.563	45,07
2.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	2.526.096	18,17	2.762.538	17,95
3.	Kepulauan Riau	1.667.081	11,99	2.027.037	13,17
4.	Sumatera Utara	247.038	1,78	289.656	1,88
5.	Jawa Timur	322.045	2,32	329.945	2,14

6.	Jawa Barat	10.309	0,07	3.293	0,02
7.	Sulawesi Utara	47.619	0,34	61.495	0,39
8.	Daerah Istimewa Yogyakarta	103.797	0,75	102.817	0,66
9.	Nusa Tenggara Timur	133.223	0,96	213.459	1,38
10.	Kalimantan Barat	87.538	0,63	100.860	0,65
11.	Nusa Tenggara Barat	81.544	0,59	94.675	0,61
12.	Lainnya	2.349.381	16,90	2.375.287	15,43
TOTAL		13.902.420	100	15.386.646	100

Sumber data BPS

Pada tahun 2025 total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia sebesar **15.386.646** di mana Kepulauan Riau menyumbang **2.027.037** kunjungan (13,17%). Pada tahun 2025 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau ada di peringkat III secara nasional setelah Bali dan Jakarta dengan kontribusi sebesar 13,17% terhadap total kunjungan wisatawan mancanegara secara nasional, pada tahun 2024 Kepulauan Riau juga menempati peringkat III secara nasional. Sementara itu kunjungan wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau masih ada di peringkat teratas untuk wilayah Sumatera.

E. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dengan indikator Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dinas

Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Upaya sebagai berikut;

- a. Menyelenggarakan event pariwisata baik skala nasional maupun internasional.
- b. Mendukung penyelenggaraan event pariwisata baik skala nasional maupun internasional.
- c. Melaksanakan promosi pariwisata dengan mengikuti pameran pariwisata baik skala nasional maupun internasional.

Upaya lain dalam meningkatkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau antara lain;

- a. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya untuk menarik kunjungan wisatawan di Kepulauan Riau.
- b. Meluncurkan program JIWA, merupakan hasil kolaborasi antara Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Pemprov Kepri, serta pelaku industri pariwisata di Kepulauan Riau. Melalui program ini, wisatawan dari Johor cukup menunjukkan ID Card Johor untuk menikmati diskon khusus antara 10 hingga 30 % di 33 destinasi hotel, restoran, transportasi, dan layanan wisata lainnya di Kepulauan Riau.



Peluncuran Program Jiwa

- c. Melibatkan seluruh stakeholder pariwisata, baik Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sendiri sebagai leading sector, dinas-dinas pendukung di Kepulauan Riau seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, serta seluruh asosiasi bidang pariwisata.

Sementara itu ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, antara lain:

1. Masih minimnya penerbangan langsung dari kota-kota potensial ke Kepulauan Riau sehingga kedatangan wisatawan belum bisa optimal
2. Mahalnya tiket transportasi juga menjadi hambatan optimalnya kunjungan wisatawan
3. Masih belum optimalnya atraksi wisata juga menjadi hambatan lama rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau, semakin lama wisatawan tinggal maka akan semakin banyak pengeluaran.

F. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Upaya kedepan dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sebagai berikut:

1. Menoptimalkan promosi pariwisata di berbagai chanel media untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Memperbanyak atraksi wisata untuk memberikan kenyamanan wisatawan sehingga memperpanjang lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau yang pada akhirnya dapat menambah pengeluaran wisatawan khususnya terkait akomodasi dan makan minum.

3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan aksesibilitas khususnya pembukaan/ penambahan rute penerbangan.

Selain itu Provinsi Kepulauan Riau masih tetap harus membenahi destinasi pariwisata, sektor transportasi sebagai pendukung utama pariwisata, seyogyanya lebih ditingkatkan baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia yang melayani wisatawan. Menjadi nilai tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi yang berdekatan dengan negara lain sehingga akses untuk masuk tentu dipermudah. Hal ini merupakan perwujudan Tourism Linkage Networking yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur dalam usaha meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau.

G. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tampilkan Program dan anggaran terkait yang mendukung kinerja)

Program yang mendukung Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara adalah Program Pemasaran Pariwisata, alokasi anggaran sebesar **Rp 7.758.633.839** tersebut terserap sebesar **Rp 5.647.330.979** atau **72,8%**.

Tabel 3.9

Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kepulauan Riau

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)

Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.791.599.129	926.608.040	51,72
		2. Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.967.034.710	4.720.722.939	79,11
Total			7.758.633.839	5.647.330.979	72,8

H. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

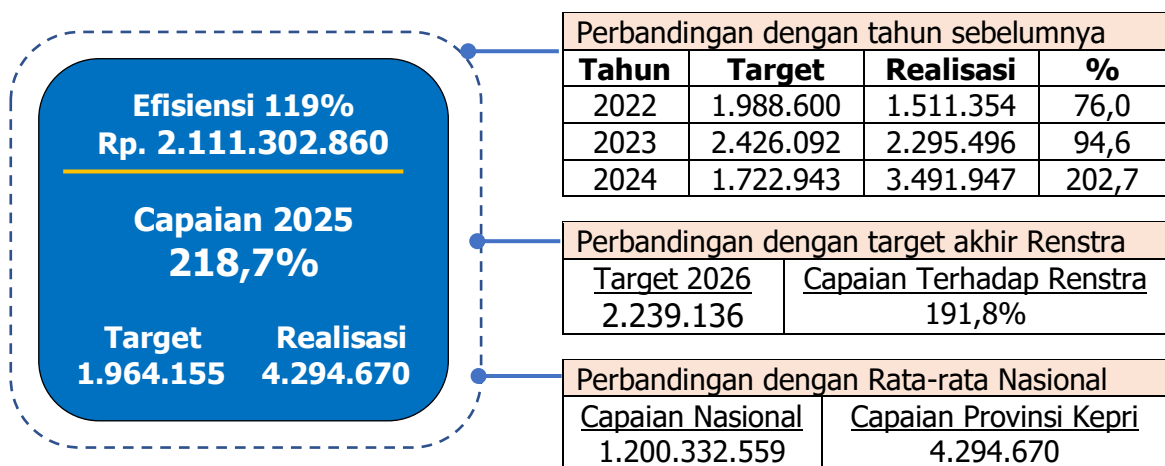
Dari jumlah anggaran sebesar Rp. Rp 7.758.633.839 terealisasi sebesar Rp. 5.647.330.979 atau 72,8 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.2.111.302.860 (27,2%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (124,99%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (72,8%) dengan efisiensi 52,9%.

**SASARAN I:
MENINGKATNYA
PENGEMBANGAN
PEMASARAN
PARIWISATA**

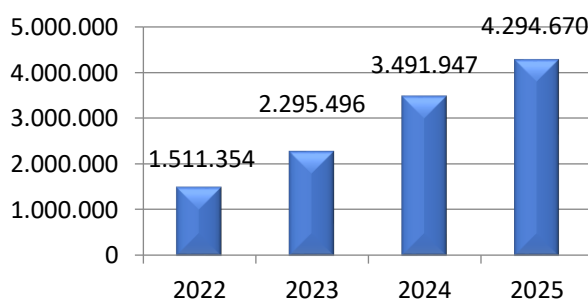
**Indikator II:
Jumlah Pergerakan
Wisatawan Nusantara**

Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara adalah jumlah penduduk yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan dalam rangka bekerja atau sekolah secara rutin.

Capaian Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 4.294.670 orang dari target sebesar 1.964.155 orang sehingga capaian kinerja mencapai 218,7%.



Tren Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara



Formulasi Indikator Kinerja

“Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau”

Sasaran I Indikator 2

Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara

Wisata adalah suatu kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata (DTW) yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Sedangkan wisatawan (*visitors*) adalah setiap orang yang mengunjungi suatu tempat di luar tempat tinggal kesehariannya selama periode tertentu, didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi seperti berlibur, rekreasi dan olahraga serta bisnis, mengunjungi teman dan keluarga, misi, menghadiri pertemuan, konferensi, kunjungan dengan alasan kesehatan, belajar dan keagamaan.

Wisatawan Nusantara (*domestic visitors*) adalah penduduk yang melakukan perjalanan di wilayah teritori suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan merupakan perjalanan dalam rangka bekerja atau sekolah secara rutin. Perjalanan Wisata ("Perjalanan"/"Bepergian") adalah bepergian/perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari tempat tinggal biasanya ke tempat di luar lingkungan sehari-hari di wilayah geografis Indonesia secara sukarela selama kurang dari 12 bulan dan bukan bertujuan untuk bekerja (memperoleh upah/gaji dari penduduk di tempat yang dituju) atau sekolah secara rutin. Tempat di luar lingkungan sehari-hari dimaksud meliputi: 1. Berwisata ke obyek wisata, dan atau 2. Mengunjungi kabupaten/kota lain dan tinggal minimal 6 jam.

Kegiatan rutin yang dimaksud adalah kegiatan sekolah dan atau bekerja (memperoleh upah/gaji sesuai tugas pokoknya dari penduduk di tempat yang dituju), yang dilakukan secara rutin (*reguler*), baik frekuensinya,

lokasinya, maupun kegiatannya. Termasuk kegiatan rutin jika mengunjungi kabupaten/kota yang sama minimal 4 kali dalam sebulan.

Wisatawan Nusantara (*domestic tourists*) adalah seseorang yang melakukan perjalanan di wilayah teritorial suatu negara, dalam hal ini Indonesia, dengan lama perjalanan kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi serta bukan perjalanan rutin (sekolah atau bekerja), dengan mengunjungi daya tarik wisata komersil, atau menginap di akomodasi komersil dan atau jarak perjalanan lebih besar atau sama dengan 100 km pergi pulang. Lebih lanjut terkait dengan maksud kunjungan atau motivasi perjalanan wisata untuk wisatawan nusantara diantaranya adalah berlibur/rekreasi, profesi/bisnis, misi/pertemuan konggres, pendidikan, kesehatan, ziarah, mengunjungi teman atau olahraga.

Perjalanan Wisata adalah bepergian/perjalanan yang dilakukan oleh penduduk Indonesia dari tempat tinggal biasanya ke tempat di luar lingkungan sehari-hari di wilayah geografis Indonesia secara sukarela selama kurang dari 6 bulan dan bukan bertujuan untuk bekerja (memperoleh upah/gaji dari penduduk di tempat yang dituju) atau sekolah secara rutin.

Saat ini pariwisata domestik dianggap sebagai kontributor utama untuk pertumbuhan pariwisata di Indonesia. Menilik daerah asal dan tujuan wisatawan nusantara, tergambar bahwa provinsi dengan jumlah penduduk besar juga cenderung memiliki jumlah perjalanan wisnus yang tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perjalanan wisatawan Nusantara masih didominasi oleh perjalanan dalam provinsi. Data ini bisa dijadikan acuan untuk membuat intervensi dalam meningkatkan jumlah perjalanan. Perlu perhatian untuk meningkatkan aksesibilitas maupun infrastruktur untuk mendukung perjalanan terutama antar provinsi.

Selanjutnya, ketersediaan hotel berbintang juga tidak memiliki hubungan yang kuat dengan persentase perjalanan wisatawan Nusantara yang melakukan wisata MICE. Seperti diketahui bahwa kegiatan MICE biasanya

diadakan di hotel jadi sewajarnya bahwa keberadaan usaha jasa akomodasi bisa mendorong jumlah perjalanan yang melakukan aktifitas MICE. Namun keberadaan hotel belum terlihat memberikan dampak langsung pada presentase perjalanan wisnus yang melakukan MICE. Hal ini bisa diyakini bahwa tujuan dan aktivitas wisnus sangat beragam. Aktivitas MICE sepertinya belum merupakan aktivitas dominan yang dilakukan oleh pelaku perjalanan.

Infrastuktur penunjang pariwisata juga dapat berupa objek daya tarik wisata (ODTW). Keberadaan ODTW terlihat memberikan dampak pada aktifitas selama perjalanan wisata. Semakin banyak jumlah ODTW dalam provinsi akan sejalan dengan semakin besarnya presentase perjalanan yang melakukan aktifitas wisata Bahari, wisata petualangan, wisata budaya, eko wisata, wisata Sejarah dan sejenisnya. Kegiatan tersebut didukung dengan keberadaan ODTW.

Salah satu kegiatan wisata yang bisa jadi pilihan pelaku perjalanan adalah wisata kuliner. Pada level provinsi terlihat bahwa jumlah restoran level Usaha Menengah Besar (UMB) berhubungan lemah dengan persentase perjalanan wisatawan Nusantara yang melakukan wisata kuliner. Kembali bahwa fasilitas kuliner, bisa juga berupa Usaha Mikro Kecil (UMK) yang tidak tercakup dalam data tersebut. Selain itu bahwa tujuan perjalanan wisatawan Nusantara sangat beragam, bisa saja wisata kuliner masih bukan merupakan kegiatan wisata yang dominan diminati. Berdasarkan hal tersebut perlu pengembangan usaha kuliner yang lebih menarik untuk menjadi salah satu aspek penarik wisatawan Nusantara. Usaha kreatif bidang kuliner perlu didorong untuk mendukung perkembangan UMK.

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Hasil evaluasi jumlah pergerakan wisatawan nusantara dengan target 1.964.155 pergerakan dapat tercapai 4.294.670 pergerakan wisatawan nusantara sehingga capaian kinerja sebesar 218,7 % atau dalam kategori kinerja Sangat Tinggi (ST). Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.10. berikut:

Tabel. 3.10.
Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)
tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)	1.964.155	4.294.670	218,7

Sumber data BPS

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan indikator jumlah pergerakan wisatawan nusantara, diperoleh gambaran bahwa dari indikator yang ditetapkan menunjukkan kinerja 218,7% atau jauh melampaui pencapaian target yang telah ditentukan.

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan capaian beberapa tahun terakhir

Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau mengalami trend yang sangat positif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.11.
Tren Perkembangan Pergerakan Wisatawan Nusantara
di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah	1.630.000	1.988.600	2.426.092	1.722.943	1.964.155	835.672	1.511.354	2.295.496	3.491.947	4.294.670

Pergerakan Wisatawan Nusantara (orang)											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sumber data BPS

Dapat dilihat dari tabel di atas Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kepulauan Riau dari tahun 2021 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Capaian Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada pada indicator Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara di Provinsi Kepulauan Riau selalu mengalami kenaikan dalam 5 (lima) tahun terakhir. Capaian Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ini jika diperbandingkan dengan capaian pada akhir tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 22,98% di mana pada akhir 2024 angka pergerakan wisatawan nusantara mencapai 3.491.947.

Capaian Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ini jika diperbandingkan dengan capaian pada akhir tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 87,09% di mana pada akhir 2023 angka pergerakan wisatawan nusantara mencapai 2.295.496.

Capaian Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2025 ini jika diperbandingkan dengan capaian pada akhir tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 184,16% di mana pada akhir 2022 angka pergerakan wisatawan nusantara mencapai 1.511.354.

Pencapaian pergerakan wisatawan nusantara tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 413,91% dimana angka pergerakan wisatawan nusantara pada akhir tahun 2021 mencapai 835.672 orang.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Kinerja target tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025 maka Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melampaui target pada akhir periode Renstra/ RPJMD (2026) yaitu Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara ditargetkan sebanyak 2.239.136 pergerakan wisatawan nusantara atau mencapai angka **191,8%**. Perbandingan target akhir RPJMD/Renstra dengan capaian tahun 2025 disajikan seperti pada tabel 3.12. berikut:

Tabel 3.12.
Perbandingan Target Kinerja sampai Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Jumlah pergerakan wisatawan nusantara (Orang)	4.294.670	2.239.136	191,8

D. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada)

Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara ke Kepulauan Riau mengalami fluktuasi dalam 5 (lima) tahun terakhir. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara tahun 2025 berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pariwisata dan Badan Pusat Statistik menempati peringkat ke-28 seluruh Indonesia atau mengalami penurunan 1 (satu) titik di mana pada tahun 2024 Kepulauan Riau ada di peringkat ke-27. Sementara itu Kepulauan Riau pada tahun 2025 menempati peringkat ke-10 di wilayah Sumatera. Jumlah pergerakan wisatawan nusantara di Indonesia dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.13. berikut:

Tabel 3.13.
Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara Menurut Provinsi Tujuan di Indonesia Tahun 2021-2025

No	Provinsi Tujuan	Tahun Kunjungan				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Aceh	5.534.405	6.954.578	8.943.786	12.924.997	20.096.350
2	Sumatera Utara	17.758.183	23.204.456	27.613.125	42.766.198	56.910.262
3	Sumatera Barat	9.603.912	12.339.263	14.692.245	19.142.418	22.302.808
4	Riau	6.143.269	8.404.236	11.147.053	17.992.224	23.926.171
5	Jambi	3.047.167	3.780.983	4.783.187	8.534.569	10.877.483
6	Sumatera Selatan	6.827.337	8.492.364	10.994.493	18.143.118	26.065.516
7	Bengkulu	1.770.693	2.113.649	2.957.142	4.571.903	7.211.781
8	Lampung	9.176.866	10.925.704	13.760.697	17.875.613	27.090.780
9	Kep. Bangka Belitung	1.063.989	1.578.407	2.382.969	3.144.851	4.511.219
10	Kepulauan Riau	835.672	1.511.354	2.295.496	3.491.947	4.294.670
11	DKI Jakarta	37.634.468	56.008.041	63.622.596	87.233.238	99.396.992
12	Jawa Barat	96.315.313	123.531.743	156.224.371	167.396.804	211.762.921
13	Jawa Tengah	147.674.185	110.345.715	115.570.236	146.842.040	146.253.837
14	D.I. Yogyakarta	22.834.000	25.743.590	30.437.069	38.030.739	40.592.837
15	Jawa Timur	159.077.924	200.548.137	207.104.573	218.711.818	217.197.652
16	Banten	36.733.930	38.597.642	44.399.501	48.257.848	62.556.582
17	Bali	9.985.110	14.259.714	20.833.503	22.644.939	26.615.306
18	Nusa Tenggara Barat	3.138.788	4.091.259	12.922.404	13.769.746	14.848.407
19	Nusa Tenggara Timur	3.108.815	3.849.353	5.064.324	7.983.247	10.401.869
20	Kalimantan Barat	2.411.392	3.279.863	4.711.038	8.165.686	13.192.118
21	Kalimantan Tengah	1.974.792	2.683.604	4.023.322	6.499.070	11.298.337
22	Kalimantan Selatan	4.282.529	5.310.737	7.869.846	11.668.618	19.017.247

23	Kalimantan Timur	2.492.841	5.431.717	7.903.336	12.205.958	15.683.381
24	Kalimantan Utara	308.841	354.580	588.871	962.342	1.698.620
25	Sulawesi Utara	3.732.957	4.421.855	5.398.846	8.202.302	14.537.959
26	Sulawesi Tengah	2.026.911	6.453.017	6.289.067	9.329.221	11.572.179
27	Sulawesi Selatan	10.228.085	28.599.212	25.426.960	36.518.290	42.530.358
28	Sulawesi Tenggara	2.581.155	12.783.046	11.069.947	12.946.373	13.272.738
29	Gorontalo	1.188.830	1.478.813	1.905.921	3.437.439	5.280.383
30	Sulawesi Barat	1.082.502	4.234.501	3.510.961	4.008.524	4.630.996
31	Maluku	639.765	612.567	1.061.844	1.856.446	3.604.744
32	Maluku Utara	672.705	1.511.241	1.808.020	2.219.681	3.531.781
33	Papua Barat	485.005	469.876	762.438	419.157	900.522
34	Papua Barat Daya	-	-	-	917.412	1.689.495
35	Papua	927.123	959.876	1.588.351	1.269.706	2.855.407
36	Papua Selatan	-	-	-	178.819	379.854
37	Papua Tengah	-	-	-	441.438	905.084
38	Papua Pegunungan	-	-	-	379.292	837.913
TOTAL		613.299.459	734.864.693	839.667.538	1.021.084.031	1.200.332.559

Sumber data : BPS dan Kementerian Pariwisata

E. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mewujudkan sasaran meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dengan indikator Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Upaya sebagai berikut;

1. Menyelenggarakan event pariwisata baik skala nasional maupun internasional.

2. Mendukung penyelenggaraan event pariwisata baik skala nasional maupun internasional.
3. Melaksanakan promosi pariwisata dengan mengikuti pameran pariwisata baik skala nasional maupun internasional.

Upaya lain dalam meningkatkan Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau antara lain;

1. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya untuk menarik kunjungan wisatawan di Kepulauan Riau.
2. Melibatkan seluruh stakeholder pariwisata, baik Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau sendiri sebagai leading sector, dinas-dinas pendukung di Kepulauan Riau seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perkim, Dinas Perhubungan, Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota, serta seluruh asosiasi bidang pariwisata.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam Peningkatan Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara di Kepulauan Riau antara lain:

1. Masih minimnya penerbangan langsung dari kota-kota potensial ke Kepulauan Riau sehingga kedatangan wisatawan belum bisa optimal
2. Mahalnya tiket transportasi juga menjadi hambatan optimalnya kunjungan wisatawan
3. Masih belum optimalnya atraksi wisata juga menjadi hambatan lama rata-rata lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau, semakin lama wisatawan tinggal maka akan semakin banyak pengeluaran.

I. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Ke depannya, Provinsi Kepulauan Riau perlu lebih meningkatkan penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya sesuai target marketnya. Selain peran media diperlukan juga peran influencer (vlogger) baik nasional maupun asing untuk meningkatkan branding pariwisata Kepulauan Riau.

Selain itu Upaya kedepan dalam meningkatkan pergerakan wisatawan nusantara sebagai berikut:

1. Menoptimalkan promosi pariwisata di berbagai chanel media untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Memperbanyak atraksi wisata untuk memberikan kenyamanan wisatawan sehingga memperpanjang lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau yang pada akhirnya dapat menambah pengeluaran wisatawan khususnya terkait akomodasi dan makan minum.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan aksesibilitas khususnya pembukaan/ penambahan rute penerbangan.

Selain itu Provinsi Kepulauan Riau masih tetap harus membenahi destinasi pariwisata, sektor transportasi sebagai pendukung utama pariwisata, seyogyanya lebih ditingkatkan baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia yang melayani wisatawan. Menjadi nilai tersendiri bagi Provinsi Kepulauan Riau dengan posisi yang berdekatan dengan negara lain sehingga akses untuk masuk tentu dipermudah. Hal ini merupakan perwujudan Tourism Linkage Networking yang menjadi salah satu program unggulan Gubernur dalam usaha meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau.

J. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tampilkan Program dan anggaran terkait yang mendukung kinerja)

Program yang mendukung Jumlah pergerakan wisatawan nusantara adalah Program Pemasaran Pariwisata, alokasi anggaran sebesar **Rp 7.758.633.839** tersebut terserap sebesar **Rp 5.647.330.979** atau **72,8%**.

Tabel 3.14

Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung pergerakan wisatawan nusantara di Kepulauan Riau

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.791.599.129	926.608.040	51,72
		2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.967.034.710	4.720.722.939	79,11
Total			7.758.633.839	5.647.330.979	72,8

a. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. Rp 7.758.633.839 terealisasi sebesar Rp. 5.647.330.979 atau 72,8 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.2.111.302.860 (27,2%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Pergerakan wisatawan Nusantara (191,8%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (72,8%) dengan efisiensi 119%.

Sasaran II

Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata ditandai dengan berkembangnya daya tarik wisata, kawasan strategis dan destinasi pariwisata provinsi. Indikator Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan ditandai dengan dikembangkannya destinasi, Kawasan strategis, dan daya Tarik pariwisata, baik alam, budaya maupun buatan.

**SASARAN II:
Meningkatnya Daya
Tarik Destinasi
Pariwisata**

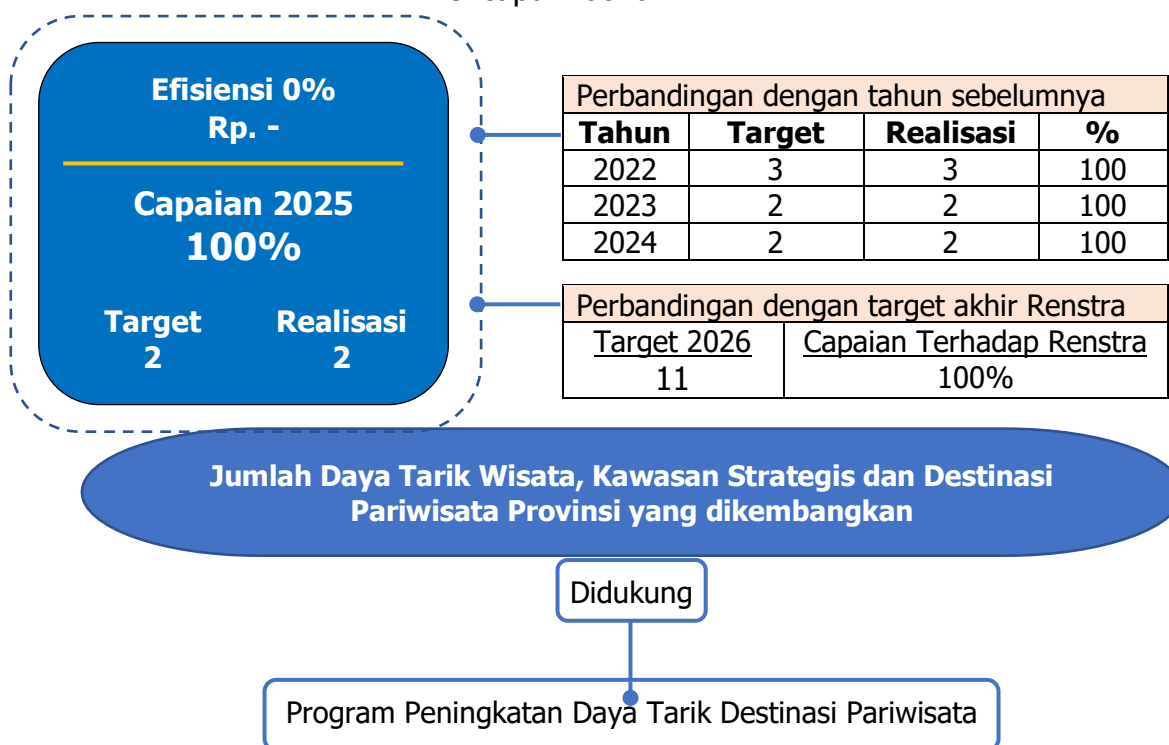
**Indikator I:
Jumlah Daya Tarik
Wisata, Kawasan
Strategis dan Destinasi
Pariwisata Provinsi
yang dikembangkan**

Daya Tarik Wisata yang dikembangkan merupakan daya tarik wisata unggulan dan prioritas yang memiliki potensi meningkatkan kunjungan dan kontribusi ekonomi daerah.

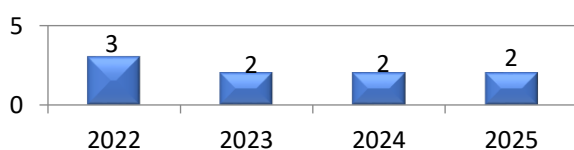
Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang dikembangkan merupakan kawasan prioritas yang memiliki pengaruh penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan merupakan kesatuan wilayah geografis yang memiliki daya tarik wisata, aksesibilitas, amenitas, serta kelembagaan pendukung yang dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.

Capaian Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 2 Daya Tarik/Kawasan/Destinasi dari target sebesar 2 Daya Tarik/Kawasan/Destinasi sehingga capaian kinerja mencapai 100%.



Tren Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang



Formulasi Indikator Kinerja

"Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan di Provinsi Kepulauan Riau"

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran meningkatnya daya Tarik destinasi pariwisata dengan indikator Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan pada tahun 2025 dilaksanakan dengan Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata. Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya hingga akhir tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.15. berikut :

Tabel. 3.15.
Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan / Destinasi)	2	2	100

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran II indikator jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan, diperoleh gambaran bahwa dari indikator kinerja yang telah ditetapkan menunjukkan kinerja 100% atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan capaian beberapa tahun terakhir

Capaian indikator jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan tahun 2025 sama dengan capaian tahun 2024, di mana pada tahun 2024 jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sebanyak 2 (dua) daya Tarik pariwisata. Sedangkan Capaian tahun 2025 jika diperbandingkan dengan capaian tahun 2023 yang lalu juga sama, di mana capaian jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan tahun 2023 sebanyak 2 (dua) Daya Tarik/ Kawasan / Destinasi. Sementara Capaian tahun 2025 jika diperbandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 33,3%, di mana capaian jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) Daya Tarik/ Kawasan / Destinasi. Indikator Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan tahun 2021 tidak dapat diperbandingkan dengan capaian tahun 2024 karena ketidaktersediaan data. Perbandingan capaian jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan dalam 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.16. berikut:

Tabel 3.16.
Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi
Pariwisata Provinsi yang dikembangkan
Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan	-	3	2	2	2	-	3	2	2	2

(Daya Tarik/ Kawasan / Destinasi)										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Kinerja target tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Secara akumulatif sampai tahun 2025 Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah mengembangkan 11 (sebelas) Daya Tarik/ Kawasan / Destinasi. Capaian hingga tahun 2025 apabila dievaluasi dari target akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 di mana pada akhir periode Renstra/RPJMD pada tahun 2026 mendatang Dinas Pariwisata menargetkan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan sebanyak 11 (sebelas) Daya Tarik/ Kawasan / Destinasi, yang artinya capaian hingga tahun 2025 baru mencapai target 100 % dari target akhir RPJMD maupun Renstra Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (lihat tabel 3.17.).

Tabel 3.17.
Perbandingan Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan / Destinasi)	11	11	100

D. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tercapainya target indikator jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan tahun 2025 dikarenakan komitmen pemerintah daerah Kepulauan Riau serta stakeholder pariwisata dalam memajukan pariwisata Kepulauan Riau. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau bersama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/ kota, serta industry pariwisata berkolaborasi dalam memajukan pariwisata di Kepulauan Riau, khususnya dalam penyelenggaraan event.

E. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Ke depannya untuk meningkatkan Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan perlu dilaksanakan event-event pariwisata baik skala nasional maupun internasional, peningkatan kualitas destinasi wisata melalui pengembangan *tourism linkage networking* maupun diversifikasi objek wisata, serta menambah destinasi wisata baru dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pariwisata.

F. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tampilkan Program dan anggaran terkait yang mendukung kinerja)

Program yang mendukung pencapaian target Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan adalah Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan alokasi anggaran Rp 220.725.000 anggaran terserap Rp 220.725.000 atau 100%.

Tabel 3.18

Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata di Kepulauan Riau

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	220.725.000	220.725.000	100
Total			220.725.000	220.725.000	100

G. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 220.725.000 terealisasi sebesar Rp. 220.725.000 atau 100 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran tidak terdapat sisa penggunaan anggaran. Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang dikembangkan (100%) sama dengan realisasi anggaran (100%) yang artinya efisiensi 0%.

SASARAN III:
Terwujudnya Pengembangan
Sumberdaya Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif Yang
Berdaya Saing dan Kredibel

Indikator I:
Persentase Sumber Daya
Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif yang Ditingkatkan

Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan adalah sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, produk dan kekayaan intelektual, serta pembiayaan dan investasi. Peningkatan dilakukan melalui penguatan kapasitas, standarisasi, digitalisasi, inovasi produk, serta pengembangan tata kelola yang profesional dan berkelanjutan guna meningkatkan daya saing daerah.

Capaian Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 2,5% dari target sebesar 2% sehingga capaian kinerja mencapai 125%.



Perbandingan dengan tahun sebelumnya			
Tahun	Target	Realisasi	%
2022	3	1,63	100
2023	3	3,95	100
2024	2	2,03	100

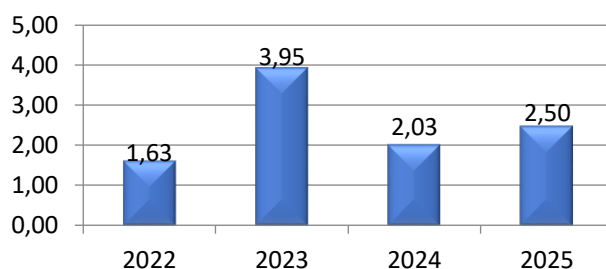
Perbandingan dengan target akhir Renstra	
Target 2026	Capaian Terhadap Renstra
10	101,1%

Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan

Didukung

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Tren Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan



Formulasi Indikator Kinerja

"Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan dibagi Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dikali 100"

Sasaran III

Terwujudnya Pengembangan Sumberdaya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Yang Berdaya Saing dan Kredibel

Sasaran III Indikator 1

Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi. Pariwisata dipandang sebagai kegiatan yang mempunyai multidimensi dari rangkaian suatu proses pembangunan. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Penyelenggaraan Kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa. Perkembangan pariwisata juga mendorong dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Sektor ini memberikan kesempatan bagi para pengusaha kecil hingga pengusaha besar karena menyerap dari berbagai usaha, antara lain perhotelan atau penginapan untuk tempat menginap selama berwisata, jasa transportasi, guide, rumah makan atau restoran, *ticketing*, dan lain-lain. Dari peningkatan jumlah wisatawan yang terus meningkat maka diharapkan berbanding lurus

dengan pendapatan yang diperoleh sehingga pengembangan dan pembangunan berjalan dengan lancar.

Oleh karena itu langkah dan kebijakan pemerintah dengan didukung oleh masyarakat daerah wisata dengan semakin memberikan kenyamanan dan kemudahan dapat terus meningkatkan pengunjung baik dari dalam maupun luar negeri yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan.

Terwujudnya pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel diukur dengan indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan.

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Pencapaian sasaran Terwujudnya pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing dan kredibel dengan indikator sasaran Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan pada tahun 2025 dilaksanakan dengan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya pada akhir tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 3.19. berikut :

Tabel. 3.19.
Pencapaian Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)	2	2,5	125

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 598/KPTS-22/I/2022 Tentang Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau rumus perhitungan Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan adalah (Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang ditingkatkan : Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif x 100). Berdasarkan data yang diperoleh Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan tahun 2024 dapat digambarkan capaiannya adalah $(330 : 12.955 \times 100) = 2,5\%$. Hasil Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan dengan target 2,0 % dapat tercapai 2,5 % sehingga capaian kinerja sebesar 125% atau dalam kategori kinerja Sangat Tinggi (ST).

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan capaian beberapa tahun terakhir

Capaian Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 23,15%, dimana capaian tahun 2024 sebesar 2,03% Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan. Capaian Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 37,71%, dimana capaian tahun 2023 sebesar 3,95%, sementara itu Capaian Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 53,37%, dimana capaian tahun 2022 sebesar 1,63% sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 3.20. sebagai berikut:

Tabel 3.20.
Capaian Indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)	Na	3	3	2	2	Na	1,63	3,95	2,03	2,5

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Kinerja target tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Sementara itu capaian sampai dengan tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata (akhir tahun 2026) telah mencapai 101,1%, atau telah mencapai target pada dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2026 Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan sebesar 10%. (lihat tabel 3.21.)

Tabel 3.21.
Perbandingan Capaian Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)	10,11	10	101,1

D. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk pencapaian indikator sasaran “Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan” Dinas Pariwisata juga telah berusaha semaksimal mungkin mengefisiensi penggunaan sumber daya yang ada, yaitu dengan melibatkan pejabat dan staf terkait untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan metode swakelola bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), di mana pegawai Dinas Pariwisata diberdayakan dalam melaksanakan tupoksinya, sehingga hal ini dapat mengefisienkan anggaran yang ada.

Menurut analisa kami, tercapainya target indikator Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan disebabkan karena adanya Kerjasama dengan Lembaga sertifikasi profesi yang melaksanakan sertifikasi secara mandiri terhadap sumberdaya pariwisata di Kepulauan Riau. Dinas pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata kabupaten/ kota se-Provinsi Kepulauan Riau, bersama Asosiasi pariwisata serta pelaku ekonomi kreatif juga telah bekerjasama dengan pihak LSP dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terkait dengan rencana pelaksanaan kegiatan berupa pelatihan maupun sertifikasi dalam rangka pendampingan terhadap sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif di Provinsi Kepulauan Riau.

E. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Ke depannya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau akan terus menjalin kerjasama dengan lembaga sertifikasi profesi, dengan Dinas terkait seperti

Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja untuk mengidentifikasi tenaga kerja khususnya yang bergerak di sektor Pariwisata dan ekonomi kreatif untuk ditingkatkan kapasitasnya.

F. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tampilkan Program dan anggaran terkait yang mendukung kinerja)

Program yang mendukung pencapaian target Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan alokasi anggaran **Rp 359.750.700** terserap **Rp 327.445.933** atau **91%**.

Tabel 3.22

Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung target Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat	1. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	91.362.000	83.676.963	91,59
		2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi	72.257.400	62.953.000	87,13

	Lanjut Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	Ekonomi Kreatif			
		3. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	82.6740.00	76.251.770	92,23
		4. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	89.944.000	83.069.200	92,36
		5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300	21.495.000	91,42
Total			359.750.700	327.445.933	91,0

G. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **359.750.700** terealisasi sebesar Rp. **327.445.933** atau 91,0 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 32.304.767 (9%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (125%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (91%) dengan efisiensi 34%.

Sasaran IV

Terwujudnya Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Mendorong Sektor Pariwisata

Ekonomi kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang berfokus pada penggunaan daya kreatif dan intelektual untuk menciptakan nilai tambah ekonomi. Ini mencakup berbagai industri dan sektor yang menghasilkan dan memanfaatkan kreativitas, keahlian, dan inovasi dalam produksi barang dan jasa. Ekonomi kreatif memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor yang dapat mendukung perekonomian nasional. Ekonomi kreatif dapat menciptakan nilai tambah dengan basis pengetahuan, warisan budaya, dan teknologi dari inovasi sampai ide kreatif menjadi karya yang dapat digunakan dan memiliki pasar.

Perkembangan ekonomi kreatif mengikuti arah perkembangan suatu wilayah karena persinggungannya dengan banyak orang atau komunitas dan pihak lain. Interaksi dengan banyak pihak, memunculkan kreativitas dan inovasi produk yang menyesuaikan dengan pertumbuhan permintaan pasar. Industri akan dapat bertahan apabila mampu memunculkan kreativitas dan inovasi terhadap produk yang dihasilkan. Salah satu penyebab pesatnya pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kepulauan Riau yaitu diuntungkan dari sisi geografis yaitu dekat dengan Singapura dan Malaysia serta posisinya berada pada jalur pelayaran internasional yang sibuk, hal tersebut membuat sektor ekonomi kreatif tumbuh dan berkembang dengan baik di Kepulauan Riau. Namun demikian, dari banyaknya pelaku ekonomi kreatif di Kepulauan Riau tidak semuanya bisa dikatakan aktif merujuk pada beberapa kriteria.

Potensi ekonomi kreatif sangat besar di Tanah Air, namun saat ini belum tergarap dengan maksimal. Mengapa ekonomi kreatif penting dibangun di Indonesia? Untuk diketahui saja, ekonomi kreatif merujuk pada sektor ekonomi yang berfokus pada penggunaan daya kreatif dan intelektual untuk

menciptakan nilai tambah ekonomi. Ini mencakup berbagai industri dan sektor yang menghasilkan dan memanfaatkan kreativitas, keahlian, dan inovasi dalam produksi barang dan jasa. Beberapa karakteristik utama dari ekonomi kreatif melibatkan pemanfaatan keahlian budaya, seni, desain, media, teknologi informasi, dan industri kreatif lainnya.

Ada beberapa alasan mengapa ekonomi kreatif perlu dikembangkan di Indonesia:

1. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan beragam etnis, tradisi, seni, dan kearifan lokal. Membangun ekonomi kreatif dapat memanfaatkan warisan budaya ini untuk menciptakan produk dan layanan yang unik serta menarik bagi pasar lokal dan internasional.
2. Indonesia memiliki populasi yang besar dan kreatif. Dengan meningkatnya akses pendidikan di berbagai bidang seni, desain, teknologi, dan industri kreatif lainnya, terdapat potensi besar dalam menciptakan tenaga kerja yang berdaya saing tinggi di sektor ekonomi kreatif.
3. Penggunaan teknologi digital yang pesat Pertumbuhan teknologi digital di Indonesia menciptakan peluang baru di sektor ekonomi kreatif. Penggunaan internet yang luas, peningkatan penetrasi smartphone, dan akses ke platform digital memberikan platform bagi pelaku industri kreatif untuk menyebarkan karya mereka secara global.
4. Industri kreatif telah menjadi motor penggerak ekonomi di berbagai negara, dan pertumbuhannya terus meningkat secara global. Dengan berpartisipasi aktif di sektor ini, Indonesia dapat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ini dan meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.
5. Pengembangan pariwisata Ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada industri pariwisata. Pameran seni, festival musik, dan kegiatan budaya lainnya dapat menarik wisatawan, menciptakan pengalaman berbeda, dan memberikan dampak positif pada perekonomian lokal.

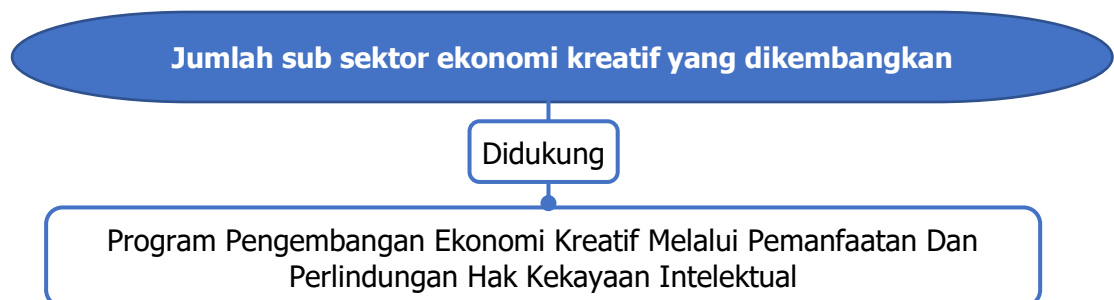
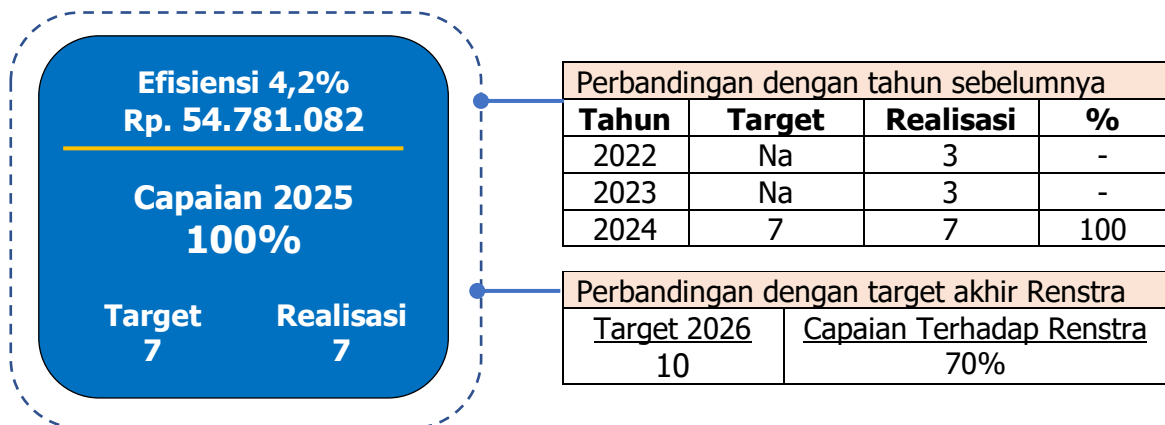
6. Membangun ekonomi kreatif dapat membantu Indonesia untuk diversifikasi struktur ekonominya. Dengan memiliki sektor ekonomi yang beragam, negara tersebut menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan krisis ekonomi.
7. Ekonomi kreatif dapat menjadi dorongan bagi kewirausahaan dan inovasi. Memberikan dukungan untuk startup dan bisnis kecil di sektor ekonomi kreatif dapat menciptakan lapangan kerja, memacu pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan ekosistem bisnis yang dinamis.
8. Mendorong keberlanjutan Kreativitas sering kali terkait dengan gagasan keberlanjutan dan penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Dengan mempromosikan ekonomi kreatif yang berkelanjutan, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.

SASARAN IV:
Terwujudnya Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Mendorong Sektor Pariwisata

Indikator I:
Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan

Sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan adalah Subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan meliputi subsektor yang memiliki potensi unggulan daerah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan identitas budaya daerah, yang mencakup antara lain kuliner, kriya, fashion, seni pertunjukan, fotografi, film dan animasi, desain komunikasi visual, serta pengembangan aplikasi dan permainan digital.

Capaian Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 7 sub sektor dari target sebesar 7 sub sektor sehingga capaian kinerja mencapai 100%.



Formulasi Indikator Kinerja

"Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau yang di kembangkan"

Sasaran IV Indikator 1

Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan

Evaluasi terhadap sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan tahun 2025 dapat digambarkan Jumlah sub sektor Ekonomi Kreatif yang mendapatkan pembinaan, baik berupa peningkatan kemampuan maupun sub sektor ekonomi kreatif yang didaftarkan kekayaan intelektualnya.

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Pada tahun 2025 Hasil evaluasi jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan dengan target 7 sub sektor dapat tercapai 7 sub sektor sehingga capaian kinerja sebesar 100% atau dalam kategori kinerja Sangat Tinggi.

Pencapaian sasaran Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata pada tahun 2025 ini dilaksanakan dengan Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.23.
Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	7	7	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran, diperoleh gambaran bahwa dari indikator yang ditetapkan pada tahun 2025 telah menunjukkan kinerja 100% atau telah mencapai target yang telah ditentukan.

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan capaian beberapa tahun terakhir

Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan di Kepulauan Riau mengalami trend yang sangat positif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.24.
Tren Perkembangan Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan	Na	Na	Na	7	7	Na	3	3	7	7

Sumber data BPS

Dapat dilihat dari tabel di atas sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan di Kepulauan Riau dari tahun 2022 hingga tahun 2025 mengalami peningkatan yang sangat signifikan.

Capaian Indikator Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan tahun 2025 adalah sama jika diperbandingkan dengan capaian tahun 2024 yaitu sebanyak 7 (tujuh) sub sektor ekonomi kreatif. Capaian Indikator Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 133,33%, di mana capaian Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang

dikembangkan pada tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) sub sektor. Sementara itu capaian Indikator Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan tahun 2022 juga mengalami kenaikan sebesar 133,33%, di mana capaian Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan pada tahun 2022 juga sebanyak 3 (tiga) sub sektor ekonomi kreatif.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Kinerja target tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Sementara itu capaian sampai dengan tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata (akhir tahun 2026) maka belum mencapai target yang ditentukan (baru mencapai 70%), target pada dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2026 Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan sebanyak 10 (sepuluh) sub sektor ekonomi kreatif. (lihat tabel 3.25.).

Tabel 3.25.
Perbandingan Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan (Sub Sektor)	7	10	70

D. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk pencapaian sasaran Terwujudnya usaha ekonomi kreatif dalam mendorong sektor pariwisata dengan indikator Jumlah sub sektor ekonomi kreatif yang dikembangkan Dinas Pariwisata telah berusaha semaksimal mungkin mengefisiensi penggunaan sumber daya yang ada, memberdayakan pegawai Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tupoksinya serta menarik program dan kegiatan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk melaksanakan kegiatannya di Kepulauan Riau, sehingga hal ini dapat mengefisiensi anggaran yang ada dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja ini.

Selain itu Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengadakan pembinaan langsung kepada pelaku ekonomi kreatif di seluruh kabupaten/ kota juga memberikan stimulus/ bantuan kepada pelaku ekonomi kreatif dalam mengembangkan produknya dan selanjutnya mendaftarkan hak kekayaan intelektual untuk produk yang dihasilkannya. Kerjasama dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil Kemenkumham Kepulauan Riau) juga merupakan upaya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam meningkatkan Persentase Produk Ekonomi Kreatif yang difasilitasi untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektualnya, sehingga para pelaku ekonomi kreatif di Kepulauan Riau lebih mudah dalam memperoleh Hak atas kekayaan intelektual terhadap produk ekonomi kreatifnya. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau juga melaksanakan promosi dan pemasaran produk ekonomi kreatif untuk lebih memperkenalkan ekonomi kreatif ke tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

E. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Ke depannya untuk mengembangkan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau akan diupayakan beberapa program, kegiatan, maupun kebijakan untuk mendukung lebih berkembangnya ekonomi kreatif di Kepulauan Riau. Salah satunya dengan melaksanakan kegiatan Perlindungan Hasil Kreatifitas berupa pengembangan produk layanan digital yaitu Layanan Kekayaan Intelektual Digital (LAKID) yang menyediakan informasi serta layanan penerbitan rekomendasi terkait pendaftaran hak merek dan pencatatan hak cipta.

F. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tampilkan Program dan anggaran terkait yang mendukung kinerja)

Program yang mendukung pencapaian target Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan adalah Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dengan alokasi anggaran **Rp 1.307.813.811** anggaran terserap **Rp 1.253.032.729** atau **95,8%**.

Tabel 3.26

Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Pengembangan Ekonomi Kreatif	Pengembangan Ekosistem	1.Perlindungan Hasil Kreativita	20.402.000	20.271.600	99,36

Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Ekonomi Kreatif	s			
		2. Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	1.227.778.351	1.173.127.779	95,55
		3. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	59.633.460	59.633.350	100
Total			1.307.813.811	1.253.032.729	95,8

G. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

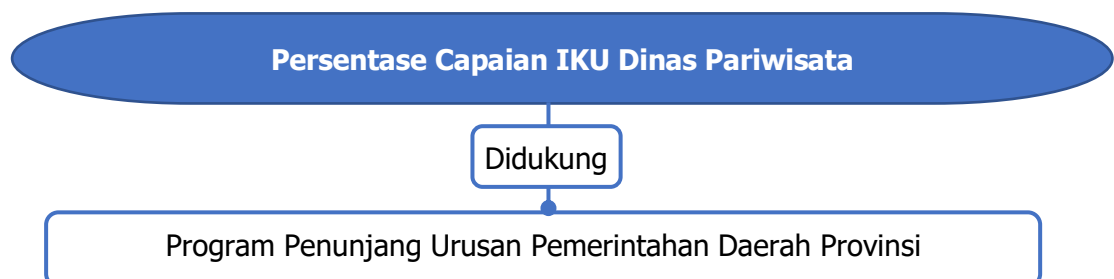
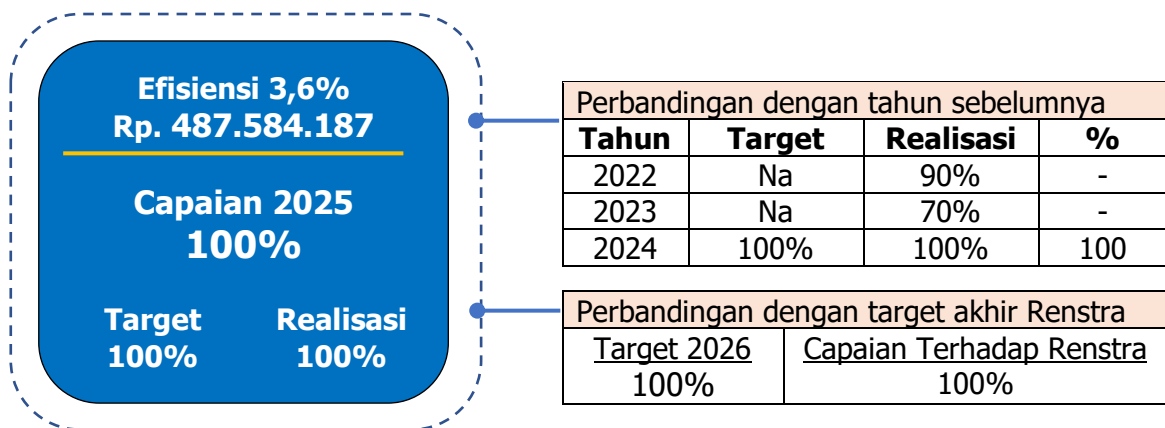
Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 1.307.813.811 terealisasi sebesar Rp. 1.253.032.729 atau 95,8 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 54.781.082 (4,2%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (95,8%) dengan efisiensi 4,2%.

**SASARAN V:
Meningkatnya Kualitas
Kinerja Dinas Pariwisata**

**Indikator I:
Persentase Capaian IKU
Dinas Pariwisata**

Persentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata adalah perbandingan antara realisasi kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja, yang dihitung dalam bentuk persentase untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah.

Capaian dari Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 100% dari target sebesar 100% sehingga capaian kinerja mencapai 100%.



Formulasi Indikator Kinerja

“Jumlah seluruh indikator utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai target dibagi jumlah seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dikali 100”

Sasaran V

Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata

Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata ditandai dengan tercapainya target Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata ditunjukkan melalui indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata selama tahun 2025.

Sasaran V Indikator 1

Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata

Sesuai dengan perubahan rencana strategis perubahan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026, Dinas Pariwisata mengemban 6 (tujuh) indikator kinerja utama, yaitu; Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara, Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan, Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan, Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan, dan Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata.

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata tahun 2025 dapat digambarkan Jumlah seluruh indikator utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau yang mencapai target dibagi jumlah seluruh Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dikali 100 ($5 : 5 \times 100 = 100$).

Hasil evaluasi Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata tahun 2025 dengan target 100% dapat tercapai 100% atau dalam kategori kinerja Sangat Tinggi. Indikator keberhasilan sasaran berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.27.
Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%)	100	100	100

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian sasaran, diperoleh gambaran bahwa dari indikator yang ditetapkan pada tahun 2025 telah menunjukkan kinerja 100 % atau telah mencapai target yang telah ditentukan.

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan capaian beberapa tahun terakhir

Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengalami trend yang sangat positif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.28.
Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Persentase Capaian	Na	Na	Na	100	100	14,28	90	70	100	100

IKU Dinas Pariwisata (%)											
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Capaian Indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata tahun 2025 adalah sama apabila diperbandingkan dengan tahun 2024, di mana pada tahun 2024 Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata sebesar 100%. Capaian Indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 10% dan 30%. Pada tahun 2023 dan 2022 Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengemban 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama. Pada tahun 2022 dari 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama yang dibebankan hanya dapat melampaui target 9 (Sembilan) indikator dan pada tahun 2023 hanya 7 (tujuh) indikator.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Kinerja target tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Sementara itu capaian sampai dengan tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata (akhir tahun 2026) telah mencapai 100%, telah mencapai target pada dokumen perencanaan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2026 Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%) sebesar 100%. (lihat table 3.29).

Tabel 3.29.
Perbandingan Capaian IKU Dinas Pariwisata Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi Hingga 2025	Target akhir RPJMD/ Renstra (2026)	%
1.	Persentase Capaian IKU Dinas	100	100	100

	Pariwisata (%)			
--	----------------	--	--	--

D. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk pencapaian sasaran "Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata dengan indikator Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata telah berusaha semaksimal mungkin mengefisiensi penggunaan sumber daya yang ada, memberdayakan pegawai Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tupoksinya sehingga hal ini dapat mengefisiensi anggaran yang ada dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan capaian indikator kinerja ini.

E. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Ke depannya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau akan lebih selektif dalam menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam upaya mencapai Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan. Selain itu perlu dilakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan program, kegiatan, dan sub kegiatan dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.

F. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tampilkan Program dan anggaran terkait yang mendukung kinerja)

Program yang mendukung pencapaian target Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Provinsi dengan anggaran 2025 sebesar Rp. 13.439.744.552,- penyerapan anggaran sebesar Rp. 12.952.160.365,- atau 96,4%.

Tabel.3.30

**Program dan Realisasi Anggaran yang mendukung Persentase
Capaian IKU Dinas Pariwisata Kepulauan Riau**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.816.872	112.430.883	93,84
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.448.130	11.212.248	90,07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.547.538.404	10.235.310.166	97,04
		2. Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.638.000	479.826.000	95,84
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	7.637.038	76,37
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.667.700	215.418.113	82,33
		2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	349.344.332	316.345.506	90,55
		3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.969.705	415.807.283	97,61

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	13.000.000	100
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.440.000	22.521.237	58,59
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.681.409	932.241.159	97,45
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.400.000	50.074.184	99,35
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.780.000	121.776.546	93,83
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.020.000	18.560.002	77,27
Total			13.439.744.552	12.952.160.365	96,4

G. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. 13.439.744.552 terealisasi sebesar Rp. 12.952.160.365 atau 96,4 %. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.487.584.187 (27,2%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Capaian IKU Dinas

Pariwisata (100%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,4%) dengan efesiensi 3,6%.

3.1.2. Capaian Kinerja Organisasi Indikator Setelah Perubahan

Pada Penyusunan RPJMD Kepulauan Riau 2025-2029 Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengemban 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif yang diukur dengan indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) dan sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau dengan indikator Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (Milyar Rupiah).

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau beserta target dan capaian realisasinya dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.31.
Capaian Indikaor Kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
(Setelah Perubahan)
Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	(%)	STATUS
1.	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	2	1,83	91,42	ST
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau	Milyar Rupiah	17.620,24	22.635,88	128,47	ST

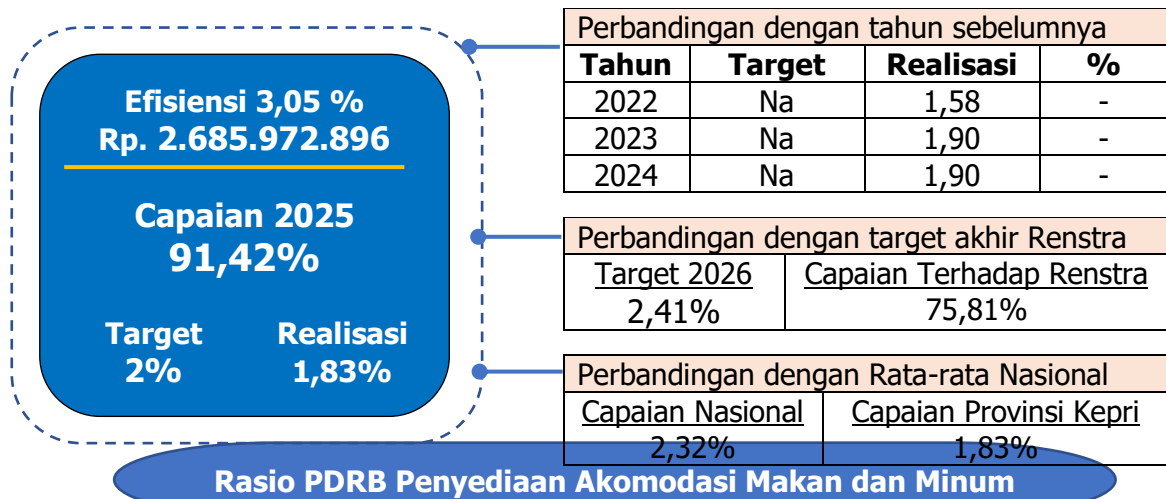
Sumber data BPS dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

SASARAN I:
Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif

Indikator :
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum merupakan persentase kontribusi kategori penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB daerah dalam satu tahun tertentu, yang digunakan untuk mengukur peranan sektor pariwisata dalam struktur perekonomian daerah.

Capaian Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 1,83% dari target sebesar 2% sehingga capaian kinerja mencapai 91,42%.



Formulasi Indikator Kinerja

"Nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum dibagi total PDRB daerah dikali 100 %"

Sasaran Strategis :

Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif

Indikator Sasaran :

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)

Pada dokumen RPJMD Kepulauan Riau tahun 2025-2029 Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengampu pada visi I yaitu “**Meningkatkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah**” dalam rangka meningkatkan pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan potensi yang belum dikelola dengan baik serta pengembangan pariwisata yang berdaya saing di pasar nasional dan internasional, sekaligus memberi peluang besar untuk meningkatkan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional dengan indikator Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%) dengan target pada tahun 2025 sebesar 2 %.

Pada sektor pariwisata lapangan usaha yang dihitung adalah pada penyediaan jasa Akomodasi dan Makan Minum. Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Penyediaan akomodasi dan makan minum merupakan penunjang terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Seringkali tingkat kemajuan sektor ini digunakan sebagai indikator dalam mengukur tingkat kemajuan ekonomi suatu daerah.

Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata

lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, villa, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya. Hotel terdiri dari hotel berbintang dan hotel non-bintang.

Sub kategori ini mencakup kegiatan penyediaan akomodasi jangka pendek untuk pengunjung atau pelancong lainnya. Termasuk penyediaan akomodasi yang lebih lama untuk pelajar, pekerja, dan sejenisnya (seperti asrama atau rumah kost dengan makan maupun tidak dengan makan). Penyediaan akomodasi dapat hanya menyediakan fasilitas akomodasi saja atau dengan makanan dan minuman dan/atau fasilitas rekreasi. Yang dimaksud akomodasi jangka pendek seperti hotel berbintang maupun tidak berbintang, serta tempat tinggal lainnya yang digunakan untuk menginap seperti losmen, motel, dan sejenisnya. Termasuk pula kegiatan penyediaan makanan dan minuman serta penyediaan fasilitas lainnya bagi para tamu yang menginap selama kegiatan tersebut berada dalam satu kesatuan manajemen dengan penginapan, alasan penggabungan ini karena datanya sulit dipisahkan. Subkategori akomodasi diperoleh dengan menggunakan pendekatan produksi. Indikator produksi yang digunakan adalah jumlah malam kamar terjual dan indikator harganya adalah rata-rata tarif per malam kamar. Output atas dasar harga berlaku diperoleh dari hasil perkalian antara indikator produksi dengan indikator harganya. Data produksi menggunakan data malam kamar terjual dari Badan Pusat Statistik.

Kegiatan subkategori makan minum mencakup pelayanan makan minum yang menyediakan makanan atau minuman untuk dikonsumsi segera, baik restoran tradisional, restoran *self service* atau restoran *take away*, baik di tempat tetap maupun sementara dengan atau tanpa tempat duduk. Yang

dimaksud penyediaan makanan dan minuman adalah penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi segera berdasarkan pemesanan.

Pencapaian sasaran Meningkatnya Pendapatan Sektor Pariwisata diukur dengan indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku. Indikator Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku menunjukkan total kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dari sub sektor akomodasi dan makan minum.

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tahun 2025 dapat digambarkan nilai PRDB sektor akomodasi dan kontribusi makan minum dibagi total PDRB daerah Kepulauan Riau. Formulasi perhitungan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Adalah Nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum dibagi total PDRB daerah dikali 100 %. Dengan rumusan sebagaimana tersebut di atas dapat dilaporkan bahwa Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tahun 2025 = Nilai PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum tahun 2025 (Rp. 6.979.950.000.000) : total PDRB daerah Kepulauan Riau (Rp. 381.729.880.000.000) X 100 % = **1,83%**

Hasil evaluasi terhadap Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dengan target 2 % dapat tercapai 1,83 % sehingga capaian kinerja sebesar 91,50% atau dalam kategori kinerja Sangat Tinggi. Indikator keberhasilan capaian Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.32.
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum
Kepulauan Riau Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2	1,83	91,50

Sumber data BPS

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan capaian beberapa tahun terakhir

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Kepulauan Riau mengalami trend yang sangat positif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 3.33.
Tren Perkembangan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	NA	NA	NA	NA	2,0	1,15	1,58	1,90	1,90	1,83

Sumber data BPS

Perbandingan capaian Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dalam beberapa tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut: capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan capaian Dinas Pariwisata pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,55% di mana pada tahun

tersebut Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 1,90 %.

capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan capaian Dinas Pariwisata pada tahun 2023 juga mengalami penurunan sebesar 3,71% di mana pada tahun tersebut Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 1,90 %.

Sementara itu capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan capaian Dinas Pariwisata pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 15,84% di mana pada tahun tersebut Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 1,90 %, Sementara itu capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan capaian tahun 2021 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 59,10% di mana Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum sebesar 1,15 %.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Kinerja target tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata (akhir tahun 2029) baru mencapai 75,81% atau masih jauh dari target yang telah ditentukan, target Indikator Kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau hingga akhir tahun 2029 sebesar 2,41%.

Tabel. 3.34
Perbandingan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi
Makan dan Minum
Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target akhir RPJMD/ Renstra (2029)	%
1.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,83	2,41	75,81

D. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi kinerja tahun yang dinilai dengan standar nasional (jika ada)

Capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan target nasional baru mencapai 78,96% atau masih jauh dari target yang telah ditentukan, di mana secara nasional Indikator Kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025 ditargetkan sebesar 2,32%.

Tabel. 3.35.
Perbandingan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi
Makan dan Minum (%) Tahun 2025 dengan Target Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target akhir RPJMD/ Renstra (2029)	%
1.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	1,83	2,32	78,96

E. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Menurut analisa kami tidak tercapainya target Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum dikarenakan belum maksimalnya angka kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau baik mancanegara maupun Nusantara yang pada akhirnya menyebabkan kontribusi penyediaan akomodasi dan makan minum yang cenderung bertambah. Kegagalan pencapaian target tersebut juga disebabkan karena meningkatnya sektor konstruksi, industri pengolahan, dan perdagangan yang menyebabkan secara rasio/ persentase PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum menjadi menurun walaupun secara angka PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum mengalami kenaikan sebesar 29.293.450.000.000 dari tahun sebelumnya.

Untuk mencapai target Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan serangkaian program dan kegiatan diantaranya melaksanakan promosi pariwisata dengan menggelar maupun mendukung beberapa pelaksanaan event baik skala nasional maupun internasional, *upskilling* tenaga kerja sektor pariwisata, publikasi pariwisata di berbagai chanel media, juga bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perhotelan dan Restoran untuk melakukan *Branding* dan Promo wisata seluas-luasnya kepada Masyarakat baik domestik maupun mancanegara agar memilih Provinsi Kepulauan Riau sebagai destinasi kunjungan dan perjalanannya.

F. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Ke depannya, untuk meningkatkan Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum akan menerapkan Langkah sebagai berikut:

1. Menoptimalkan promosi pariwisata di berbagai chanel media untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Memperbanyak atraksi wisata untuk memberikan kenyamanan wisatawan sehingga memperpanjang lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau yang pada akhirnya dapat menambah pengeluaran wisatawan khususnya terkait akomodasi dan makan minum.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan aksesibilitas khususnya pembukaan/ penambahan rute penerbangan.
4. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau masih tetap harus membenahi destinasi pariwisata, sektor transportasi sebagai pendukung utama pariwisata, seyogyanya lebih ditingkatkan baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia yang melayani wisatawan.

G. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tampilkan Program dan anggaran terkait yang mendukung kinerja)

Untuk mendukung Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum digunakan seluruh Program yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, yaitu; Program Pemasaran Pariwisata, Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata , Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 23.086.667.902** tersebut terserap sebesar **Rp 20.400.695.006** atau **88,37 %**.

Tabel.3.36.

**Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum**

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.791.599.129	926.608.040	51,72
		2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.967.034.710	4.720.722.939	79,11
Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	220.725.000	220.725.000	100
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	91.362.000	83.676.963	91,59
		2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi,	72.257.400	62.953.000	87,13

		dan Konservasi Ekonomi Kreatif			
		3. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	82.6740.00	76.251.770	92,23
		4. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	89.944.000	83.069.200	92,36
		5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300	21.495.000	91,42
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1. Perlindungan Hasil Kreativitas	20.402.000	20.271.600	99,36
		2. Pendukung Pemasaran Ekonomi Kreatif	1.227.778.351	1.173.127.779	95,55
		3. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	59.633.460	59.633.350	100
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.816.872	112.430.883	93,84
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.448.130	11.212.248	90,07
	Administrasi Keuangan	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.547.538.404	10.235.310.166	97,04

	Perangkat Daerah				
		2. Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.638.000	479.826.000	95,84
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	7.637.038	76,37
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.667.700	215.418.113	82,33
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	349.344.332	316.345.506	90,55
		3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.969.705	415.807.283	97,61
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Sura Menyurat	13.000.000	13.000.000	100
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.440.000	22.521.237	58,59
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.681.409	932.241.159	97,45
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.400.000	50.074.184	99,35
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.780.000	121.776.546	93,83
		3. Pemeliharaan	24.020.000	18.560.002	77,27

		Peralatan dan Mesin Lainnya			
Total			23.086.667.902	20.400.695.006	88,37

H. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **23.086.667.902** terealisasi sebesar Rp. **20.400.695.006** atau **88,37 %**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.685.972.896 (11,63%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (91,42%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (88,37%) dengan efisiensi 3,05%.

SASARAN I:
Meningkatnya Kontribusi
Sektor Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif di Kepulauan
Riau

Indikator :
Total Pengeluaran
Wisatawan di Kepulauan
Riau (Milyar Rupiah)

Total pengeluaran wisatawan adalah keseluruhan nilai belanja yang dikeluarkan oleh wisatawan selama berada di destinasi dalam periode tertentu, yang digunakan sebagai indikator kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Capaian Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau sangat baik dengan realisasi kinerja sebesar 22.635,88 Milyar Rupiah dari target sebesar 17.620,24 Milyar Rupiah sehingga capaian kinerja mencapai 128,47%.

Efisiensi 40,1 %
Rp. 2.685.972.896

Capaian 2025
128,47%

Target **Realisasi**
17.620,24 **22.635,88**

Perbandingan dengan tahun sebelumnya

Tahun	Target	Realisasi	%
2022	Na	6.499,63	-
2023	Na	9.740,81	-
2024	Na	15.932,37	-

Perbandingan dengan target akhir Renstra

Target 2026	Capaian Terhadap Renstra
2,41%	75,81%

Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau

Didukung

Program
Peningkatan Daya
Tarik Destinasi
Pariwisata

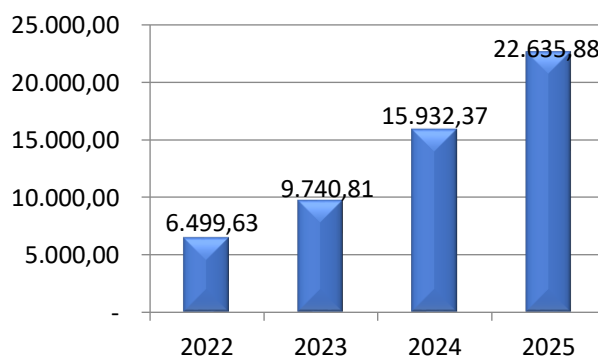
Program
Pemasaran
Pariwisata

Program
Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Melalui
Pemanfaatan Dan

Program
Pengembangan
Sumber Daya
Pariwisata Dan
Ekonomi Kreatif

Program Penunjang
Urusan
Pemerintahan
Daerah Provinsi

Tren Total Pengeluaran Wisatawan di
Kepulauan Riau (Milyar Rupiah)



Formulasi Indikator Kinerja

"Total jumlah wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau x rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan x kurs) + (total jumlah wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau x pengeluaran per kunjungan"

Sasaran Strategis :

Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau

Indikator Sasaran :

Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (Milyar Rupiah)

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Dalam usaha memperbesar pendapatan asli daerah, maka program pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pembangunan ekonomi.

Pengeluaran wisman adalah jumlah pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan selama melakukan perjalanan. Pengeluaran ini dibedakan berdasarkan:

- Akomodasi adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk akomodasi dan pengeluaran makan dan minum yang tidak dapat dipisahkan dengan akomodasi.
- Makan dan minum adalah semua pengeluaran makan dan minum selama melakukan perjalanan.
- Penerbangan domestik adalah pengeluaran penerbangan di Indonesia yang digunakan selama melakukan perjalanan.
- Transportasi lokal adalah pengeluaran untuk transportasi lokal yang digunakan selama berada di Indonesia, dalam hal ini transportasi yang digunakan adalah transportasi darat, dan laut/penyeberangan.
- Belanja adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk keperluan belanja kebutuhan selama berada di Indonesia.

- Cenderamata adalah pengeluaran untuk cenderamata yang dibeli di Indonesia untuk dibawa pulang ke negaranya.
- Hiburan adalah pengeluaran untuk hiburan yang dilakukan selama di Indonesia, seperti karaoke, dan sebagainya.
- Kesehatan dan kecantikan adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk keperluan kesehatan dan kecantikan, dalam hal ini pengeluaran spa termasuk di dalamnya.
- Kursus/pelatihan adalah pengeluaran untuk biaya kursus atau pelatihan.
- Paket wisata lokal adalah pengeluaran untuk paket wisata selama di Indonesia.
- Rekreasi adalah pengeluaran untuk biaya tiket masuk ke obyek wisata komersial.
- Jasa pemandu wisata adalah pengeluaran untuk biaya jasa pemandu wisata selama di Indonesia.
- Lainnya adalah biaya yang timbul diluar biaya-biaya di atas.

Semakin lama wisatawan tinggal di suatu daerah tujuan wisata, maka semakin banyak pula uang yang dibelanjakan di daerah tujuan wisata tersebut. Dengan adanya kegiatan konsumtif baik dari wisatawan mancanegara maupun domestik, maka akan memperbesar pendapatan dari sektor pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu, semakin tingginya arus kunjungan wisatawan, maka pendapatan sektor pariwisata di suatu daerah juga akan semakin meningkat.

Secara sederhana konsumsi sektor pariwisata merupakan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh wisatawan dalam rangka memenuhi kebutuhan (*needs*), keinginan (*wants*), dan harapan (*expectation*) selama tinggal di daerah tujuan wisata yang dikunjunginya mulai dari paket perjalanan, akomodasi, makanan dan minuman, transportasi, rekreasi budaya dan olahraga, belanja, dan lain-lain.

Dampak pengeluaran sektor pariwisata terhadap perekonomian akan menyebabkan perekonomian masyarakat lokal menggeliat dan menjadi stimulus berinvestasi dan menyebabkan sektor keuangan bertumbuh seiring bertumbuhnya sektor ekonomi lainnya. Berkembangnya sektor pariwisata juga dapat mendorong pemerintah lokal untuk menyediakan infrastruktur yang lebih baik, penyediaan air bersih, listrik, telekomunikasi, transportasi umum dan fasilitas pendukung lainnya sebagai konsekuensi logis dan kesemuanya itu dapat meningkatkan kualitas hidup baik wisatawan dan juga masyarakat lokal itu sendiri sebagai tuan rumah.

Pendapatan sektor pariwisata seringkali digunakan untuk mengukur nilai ekonomi pada suatu kawasan wisata. Sementara ada beberapa pendapatan lokal sangat sulit untuk dihitung karena tidak semua pengeluaran wisatawan dapat diketahui dengan jelas seperti misalnya penghasilan para pekerja informal seperti sopir taksi tidak resmi, pramuwisata tidak resmi, dan lain sebagainya.

Pencapaian sasaran sasaran Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau juga diukur dengan total pengeluaran wisatawan di Kepulauan Riau. Indikator total pengeluaran wisatawan di Kepulauan Riau menunjukkan total pengeluaran wisatawan selama berkunjung ke Kepulauan Riau yang rinciannya dapat dikelompokkan ke dalam 13 (tiga belas) jenis pengeluaran utama yaitu; akomodasi, makanan dan minuman, cinderamata, belanja, transport lokal, paket tour lokal, penerbangan/transportasi domestik, pesiar, hiburan, kesehatan, pemandu wisata, pendidikan, dan lainnya.

A. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1462/KPTS-23/IX/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 rumus perhitungan total pengeluaran wisatawan di Kepulauan Riau adalah (Total jumlah wisatawan mancanegara ke Kepulauan Riau x rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan x kurs) + (total jumlah wisatawan nusantara ke Kepulauan Riau x pengeluaran per kunjungan). Berdasarkan data yang diperoleh dan dihitung berdasarkan rumus perhitungan total pengeluaran wisatawan yang datang ke Kepulauan Riau adalah $(2.027.037 \times 280,61 \times 16.140.000) + (4.294.670 \times 3.133.030) = \text{Rp. } 22.635.884.303.009$. Hasil evaluasi Total pengeluaran wisatawan di Kepulauan Riau dengan target 17.620,24 Milyar Rupiah dapat tercapai 22.635,88 milyar Rupiah sehingga capaian kinerja adalah sebesar 128,47% atau dalam kategori kinerja **Sangat Tinggi**.

Indikator keberhasilan capaian Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau berikut target dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Tabel. 3.37.
Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau
Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (Milyar Rupiah)	17.620,24	22.635,88	128,47

Sumber data BPS

B. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi dengan target tahun yang dinilai berdasarkan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah dengan capaian beberapa tahun terakhir

Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau di Kepulauan Riau mengalami trend yang sangat positif dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel.3.38.
Tren Perkembangan Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau
Tahun 2021-2025

No.	Indikator Kinerja	Target					Realisasi				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (Milyar Rupiah)	NA	NA	NA	NA	17.620,25	4.5587,07	6.499,63	9.740,81	15.932,37	22.635,888,7

Sumber Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

Perbandingan capaian Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau dalam beberapa tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut: capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan capaian Dinas Pariwisata pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 42,07 % di mana pada tahun tersebut Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau sebesar 15.932,37 Milyar rupiah.

capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan capaian Dinas Pariwisata pada tahun 2023 juga mengalami kenaikan sebesar 132,38 % di mana pada tahun tersebut Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau sebesar 9.7408,81 Milyar rupiah.

Sementara itu capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan capaian Dinas Pariwisata pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 248% di mana pada tahun tersebut Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau sebesar 6.499,63 milyar rupiah, Sementara itu capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan capaian tahun 2021 juga mengalami kenaikan yaitu sebesar 396,54 % di mana Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau sebesar 4.5587,07 milar rupiah, sebagaimana diketahui bersama tahun 2021

hampir seluruh dunia dilanda covid-19 yang mengakibatkan penurunan jumlah kunjungan wisatawan.

C. Informasi/analisis tentang perbandingan antara realisasi Kinerja target tahun yang dinilai dengan target akhir Renstra

Capaian tahun 2025 apabila diperbandingkan dengan target akhir Rencana Strategis Dinas Pariwisata (akhir tahun 2029) baru mencapai 88,19% atau mencapai target yang telah ditentukan, target Indikator Kinerja Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau pada dokumen Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada akhir tahun 2029 sebesar 25.667,5 miliar rupiah (lihat tabel 3.39.).

Tabel 3.39.
Perbandingan Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau
Tahun 2025 dengan Target akhir Renstra/RPJMD

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target akhir RPJMD/ Renstra (2029)	%
1.	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (Milyar Rupiah)	22.635,88	25.667,5	88,19

D. Informasi/analisis tentang faktor-faktor penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Menurut analisa kami tercapainya target total pengeluaran wisatawan di Kepulauan Riau dikarenakan naiknya angka kunjungan wisatawan ke Kepulauan Riau baik mancanegara maupun Nusantara yang pada akhirnya menyebabkan bertambahnya total pengeluaran wisatawan di Kepulauan Riau.

Untuk mencapai target Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan serangkaian

program dan kegiatan diantaranya melaksanakan promosi pariwisata dengan menggelar maupun mendukung beberapa pelaksanaan event baik skala nasional maupun internasional, upskilling tenaga kerja sektor pariwisata, publikasi pariwisata di berbagai chanel media, juga bekerjasama dengan Pelaku Usaha Perhotelan dan Restoran untuk melakukan Branding dan Promo wisata seluas-luasnya kepada Masyarakat baik domestik maupun mancanegara agar memilih Provinsi Kepulauan Riau sebagai destinasi kunjungan dan perjalanannya.

E. Informasi /analisis upaya-upaya perbaikan kinerja kedepan (hal-hal yang akan dilakukan tahun 2026 dalam peningkatan sasaran kinerja)

Ke depannya, untuk meningkatkan total pengeluaran wisatawan di Kepulauan Riau akan menerapkan Langkah sebagai berikut:

1. Menoptimalkan promosi pariwisata di berbagai chanel media untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan
2. Memperbanyak atraksi wisata untuk memberikan kenyamanan wisatawan sehingga memperpanjang lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau yang pada akhirnya dapat menambah pengeluaran wisatawan khususnya terkait akomodasi dan makan minum.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan aksesibilitas khususnya pembukaan/ penambahan rute penerbangan.
4. Selain itu Provinsi Kepulauan Riau masih tetap harus membenahi destinasi pariwisata, sektor transportasi sebagai pendukung utama pariwisata, seyogyanya lebih ditingkatkan baik dari segi fasilitas maupun sumber daya manusia yang melayani wisatawan.

F. Informasi/analisis tentang program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja (Tampilkan Program dan anggaran terkait yang mendukung kinerja)

Untuk mendukung Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau digunakan seluruh Program yang ada di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, yaitu; Program Pemasaran Pariwisata, Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar **Rp 23.086.667.902** tersebut terserap sebesar **Rp 20.400.695.006** atau **88,37 %**.

Tabel.3.40

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Capaian Anggaran (%)
Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	1.791.599.129	926.608.040	51,72
		2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	5.967.034.710	4.720.722.939	79,11

Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi	220.725.000	220.725.000	100
Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjut Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan	1. Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	91.362.000	83.676.963	91,59
		2. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	72.257.400	62.953.000	87,13
		3. Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	82.6740.00	76.251.770	92,23
		4. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	89.944.000	83.069.200	92,36
		5. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	23.513.300	21.495.000	91,42
Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1. Perlindungan Hasil Kreativitas	20.402.000	20.271.600	99,36

Intelektual					
		2. Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	1.227.778.351	1.173.127.779	95,55
		3. Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	59.633.460	59.633.350	100
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.816.872	112.430.883	93,84
		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12.448.130	11.212.248	90,07
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.547.538.404	10.235.310.166	97,04
		2. Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	500.638.000	479.826.000	95,84
		3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.000.000	7.637.038	76,37
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	261.667.700	215.418.113	82,33
		2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	349.344.332	316.345.506	90,55
		3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	425.969.705	415.807.283	97,61
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Survei Menyurat	13.000.000	13.000.000	100
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber	38.440.000	22.521.237	58,59

		Daya Air dan Listrik			
		3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	956.681.409	932.241.159	97,45
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.400.000	50.074.184	99,35
		2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	129.780.000	121.776.546	93,83
		3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	24.020.000	18.560.002	77,27
Total			23.086.667.902	20.400.695.006	88,37

G. Informasi/analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Dari jumlah anggaran sebesar Rp. **23.086.667.902** terealisasi sebesar Rp. **20.400.695.006** atau **88,37 %**. Hal ini menunjukkan dalam pencapaian sasaran terdapat sisa penggunaan anggaran sebesar Rp. 2.685.972.896 (11,63%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran diketahui bahwa capaian indikator kinerja **Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau** (128,47%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (88,37%) dengan efisiensi 40,1%.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau di masa mendatang memiliki komitmen untuk meningkatkan kinerja dan melakukan inovasi dalam menyusun serta melaksanakan program pembangunan kepariwisataan. Arah kebijakan pembangunan kepariwisataan akan tetap mengacu kepada arah kebijakan kepariwisataan yang telah ditetapkan pada tingkat Nasional dan Provinsi, serta akan meneruskan hal yang positif yang telah dilaksanakan pada tahun 2025.

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun transisi antara Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2021-2026 dengan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau tahun 2025-2029. Beberapa keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau pada tahun anggaran 2025 telah menunjukkan kinerja yang maksimal melalui pelaksanaan serangkaian program yang dituangkan dalam kegiatan dan sub kegiatan yang diembannya untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Berdasarkan realisasi sasaran tahun 2025 diketahui bahwa secara rata-rata sasaran dapat tercapai. Sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja 2025 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah terutama terkait indikator yang bisa dimaksimalkan pada tahun 2025 lalu dan akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan

untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2027 dengan ruang lingkup pembangunan pariwisata, yaitu sebagai berikut:

1. Lebih mengoptimalkan pemasaran melalui media elektronik dan media sosial lainnya.
2. Ke depannya Dinas Pariwisata akan memberikan kepastian jadwal pelaksanaan event serta memperbanyak pelaksanaan event-event wisata daerah di Kepri dan bersifat *annual*, serta terjadwal dengan pasti, sehingga wisatawan bisa dengan baik menjadwalkan kunjungannya dan diharapkan lama tinggal wisatawan akan semakin meningkat.
3. Memperbanyak pengembangan dan perintisan objek wisata baru yang diharapkan juga dapat mendongkrak lama tinggal wisatawan di Kepulauan Riau.
4. Peningkatan kualitas destinasi wisata melalui pengembangan *tourism linkage networking* maupun diversifikasi objek wisata.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan, serta menjadi bahan evaluasi dan pengendalian di masa yang akan datang.



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Hasan, S.Sos.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., MM.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 23 Mei 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E., MM.

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau**



**Hasan, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197711102006041010**

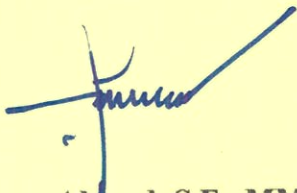
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (Orang)	1.621.695
		Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara (Orang)	1.964.155
2.	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis dan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Dikembangkan (Daya Tarik/ Kawasan/ Destinasi)	2
3.	Terwujudnya Usaha Ekonomi Kreatif Dalam Mendorong Sektor Pariwisata	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan (Sub Sektor)	7
4.	Terwujudnya Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dan Kredibel	Persentase Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Ditingkatkan (%)	2
5.	Meningkatnya Kualitas Kinerja Dinas Pariwisata	Persentase Capaian IKU Dinas Pariwisata (%)	100

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 8.708.633.839,00	APBD
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 180.266.734,00	APBD
3.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 359.750.700,00	APBD
4.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 810.333.811,00	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.825.294.503,00	APBD

Tanjungpinang, 23 Mei 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau



H. Ansar Ahmad, S.E., MM.

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau



Hasan, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197711102006041010



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Hasan, S.Sos.**

Jabatan : **Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **Pihak Kesatu**

Nama : **H. Ansar Ahmad, S.E., MM.**

Jabatan : **Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

**Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau**

H. Ansar Ahmad, S.E., MM.

**Pihak Kesatu,
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau**



**Hasan, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197711102006041010**

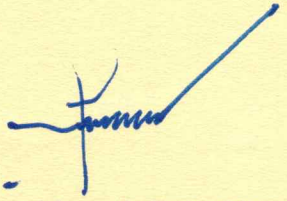
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,0
2.	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kepulauan Riau	Total Pengeluaran Wisatawan di Kepulauan Riau (Milyar Rupiah)	17.620,25

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pemasaran Pariwisata	Rp. 7.758.633.839,-	APBD
2.	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp. 220.725.000,-	APBD
3.	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Rp. 1.307.813.811,-	APBD
4.	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Rp. 359.750.700,-	APBD
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 13.442.092.865,-	APBD

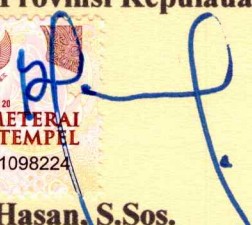
Tanjungpinang, 10 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Gubernur Kepulauan Riau


H. Ansar Ahmad, S.E., MM.

Pihak Kesatu,
Kepala Dinas Pariwisata
Provinsi Kepulauan Riau




Hasan, S.Sos.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197711102006041010



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DINAS PARIWISATA

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Daeng Merewah Lantai 1 dan 2
Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang Kode Pos 29124
Pos-el : dispar@kepriprov.go.id

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 1462 /KPTS-23/IX/2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU

TAHUN 2025-2029

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Gubernur wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/5/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 55);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 69);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 Nomor 909);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 1011);
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 44 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2020 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 1064);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disebutkan dalam Lampiran Keputusan ini.

- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagai dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di lingkungan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau dalam :
1. Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan.
 2. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran.
 3. Menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja.
 4. Menyusun Laporan Kinerja.
 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen perencanaan.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2025

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**



**HASAN, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197711102006041010**

- Salinan** : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang
 2. Wakil Gubernur Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 3. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 4. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang.

Lampiran : Keputusan Gubernur Kepulauan Riau
Nomor : 1462/KPTS-23/IX/2025.
Tanggal : 22 SEPTEMBER 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PARIWISATA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2025-2029**

- Perangkat Daerah : Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau
- Tugas : Melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.
- Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Sekretariat, pengembangan destinasi pariwisata, pengembanan pemasaran pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
2. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Sekretariat, pengembangan destinasi pariwisata, pengembanan pemasaran pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
3. Pelaksanaan administrasi di Bidang Sekretariat, pengembangan destinasi pariwisata, pengembanan pemasaran pariwisata, pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan, dan pengembangan ekonomi kreatif.
4. Penerapan sistem pengendalian intern pada Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terinterasi.
5. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada unit kerjanya.
6. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFENISI OPERASIONAL	FORMULASI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya kontribusi sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Provinsi Kepulauan Riau	Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum	Rasio PDRB penyediaan akomodasi, dan makan minum adalah persentase kontribusi sektor akomodasi dan makan minum terhadap total PDRB suatu daerah	Rasio PDRB sektor akomodasi, dan makan minum (%) = $(\text{Nilai PDRB sektor akomodasi dan makan minum} / \text{total PDRB Daerah}) \times 100\%$	Badan Pusat Statistik
		Total pengeluaran wisatawan di Provinsi Kepulauan Riau	Total pengeluaran wisatawan menunjukkan jumlah total uang yang dibelanjakan/dihabiskan oleh seorang wisatawan untuk akomodasi, transportasi, makanan, minuman, belanja, hiburan, dan kebutuhan lainnya selama melakukan perjalanan wisata	$(\text{Total jumlah wisatawan mancanegara ke Provinsi Kepulauan Riau} \times \text{rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan} \times \text{kurs}) + (\text{total jumlah wisatawan nusantara ke Provinsi Kepulauan Riau} \times \text{pengeluaran per kunjungan})$	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau

**a.n. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


**HASAN, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197711102006041010**